



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025

**SATPOL PP DAMKAR**  
KABUPATEN PURWOREJO

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

Jl. Kyai Brengkel Nomor 28 Purworejo Kode Pos 54118 Telp. (0275) 323350 – 219/113 Fax. (0275)323350  
Laman: [satpolppdamkar.purworejokab.go.id](http://satpolppdamkar.purworejokab.go.id) Pos-el: [satpolpp@purworejokab.go.id](mailto:satpolpp@purworejokab.go.id)

TAHUN 2026

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.3. Profil Organisasi.....	6
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1.3.2. Sumber Daya Manusia.....	10
1.3.3. Sumber Daya Anggaran.....	16
1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	18
1.4.1. Aspek Strategis.....	18
1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	20
1.5. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD.....	24
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 2025.....	27
2.3. Struktur Program Tahun 2025.....	28
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024.....	32
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	44
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	97
3.3. Inovasi.....	107
3.4. Penghargaan.....	110

BAB IV PENUTUP.....	111
4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	111
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	113
LAMPIRAN.....	115
1. Daftar Referensi	
2. SK Tim Penyusun LKJIP 2024	
3. SK Penetapan LKJIP 2024	
4. PK PD Murni dan Perubahan	
5. Laporan realisasi anggaran per Program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD	
6. SK IKU PD	
7. Hasil SKM Tahun 2025	
8. Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	
9. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Golongan ..	10
Tabel 1.2. Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Pangkat.....	11
Tabel 1.3. Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	11
Tabel 1.4. Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Pendidikan Dasar dan Diklat.....	12
Tabel 1.5. Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Jenis Kelamin .....	12
Tabel 1.6. Inventaris Tanah Satpol PP Damkar Kab. Purworejo .....	13
Tabel 1.7. Inventaris Peralatan dan Mesin Satpol PP Damkar.....	13
Tabel 1.8. Inventaris Gedung dan Bangunan Satpol PP Damkar Kab.Purworejo ..	16
Tabel 1.9. Inventaris Jalan, Irigasi, dan jaringan Satpol PP Damkar Kab. Purworejo .....	16
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 .....	25
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 .....	27
Tabel 2.3 Program Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	29
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo .....	30
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo .....	36
Tabel 2.6 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024 Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo .....	33
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	44
Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	45
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025 .....	46
Tabel 3.4 Capaian Program terhadap Sasaran I Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025 .....	49

Tabel 3.5 Capaian Program terhadap Sasaran II Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025 .....	53
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I .....	61
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis II .....	64
Tabel 3.8 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2025 .....	69
Tabel 3.9 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025 .....	74
Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Keuangan Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 .....	98
Tabel 3.11 Penghargaan Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 .....	110

## GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo .....	9
Gambar 2.1 <i>Screenshot</i> aplikasi SAWIJI.....	38
Gambar 2.2 <i>Screenshot</i> aplikasi E-Kinerja BKN .....	39
Gambar 2.3 <i>Screenshot</i> aplikasi ESR Menpan .....	39
Gambar 2.4 <i>Screenshot</i> aplikasi E-SPM Kemendagri.....	40
Gambar 2.5 <i>Screenshot</i> aplikasi SIPD-RI .....	41
Gambar 2.6 <i>Screenshot</i> aplikasi SIMKEUDA.....	41
Gambar 2.7 <i>Screenshot</i> aplikasi SIRUP .....	42
Gambar 2.8 <i>Screenshot</i> aplikasi Website Satpol PP Damkar Kab. Purworejo...	43
Gambar 3.1 Tampilan Inovasi GAS PEDAS.....	109
Gambar 3.2 Tampilan Inovasi SIAPNO DAMKAR.....	109
Gambar 3.3 Tampilan Ringkasan Aduan Inovasi SIAPNO DAMKAR .....	110

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo tahun 2025. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

### Tujuan I: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	88,33	88,33	100%

**Tujuan II:** Peningkatan Pelayanan Trantib umlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).	%	100	100	100%

Kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp11.829.276.668,00 atau 95,48% dari total pagu anggaran sebesar Rp12.389.177.238,00

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 20 Februari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Purworejo,



Siswantero Dwi Nugroho, S.STP., M.M.  
Pembina Tingkat I/IV/b  
NIP. 1982061620011210003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya publik. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tahun 2025 dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah (*agile*), berbasis data (*evidence-based policy*), dan bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja bukan hanya dipandang sebagai kewajiban pelaporan tahunan, melainkan sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo selaku Aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat perlu menyelenggarakan Pemerintahan yang *Good Governance* yang merupakan persyaratan setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam rangka penerapan kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo yang meliputi Perencanaan strategis dan manajemen kinerja. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas *legitimate* serta Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berdaya saing di bidang teknologi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme menuju ke pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang terukur terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025 merupakan capaian kinerja dari RPJMD Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026. Melalui laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas penggunaan anggaran terhadap hasil (*outcome*) yang dicapai, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dasar hukum penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 seri D Nomor 1) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15/2024);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5/2025);
19. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
20. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 135 Seri D Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 82);
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 4 Seri E Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 23 Seri A Nomor 3).

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo adalah:

- a. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel;
- b. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2025 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Memberikan arah dan langkah perbaikan di tahun-tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian sasaran.

### **1.2.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo adalah:

- a. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo selama Tahun Anggaran 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dalam menerapkan asas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

### **1.3. Profil Organisasi**

#### **1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Satpol PP Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP Damkar berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

##### **1) Tugas**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran.

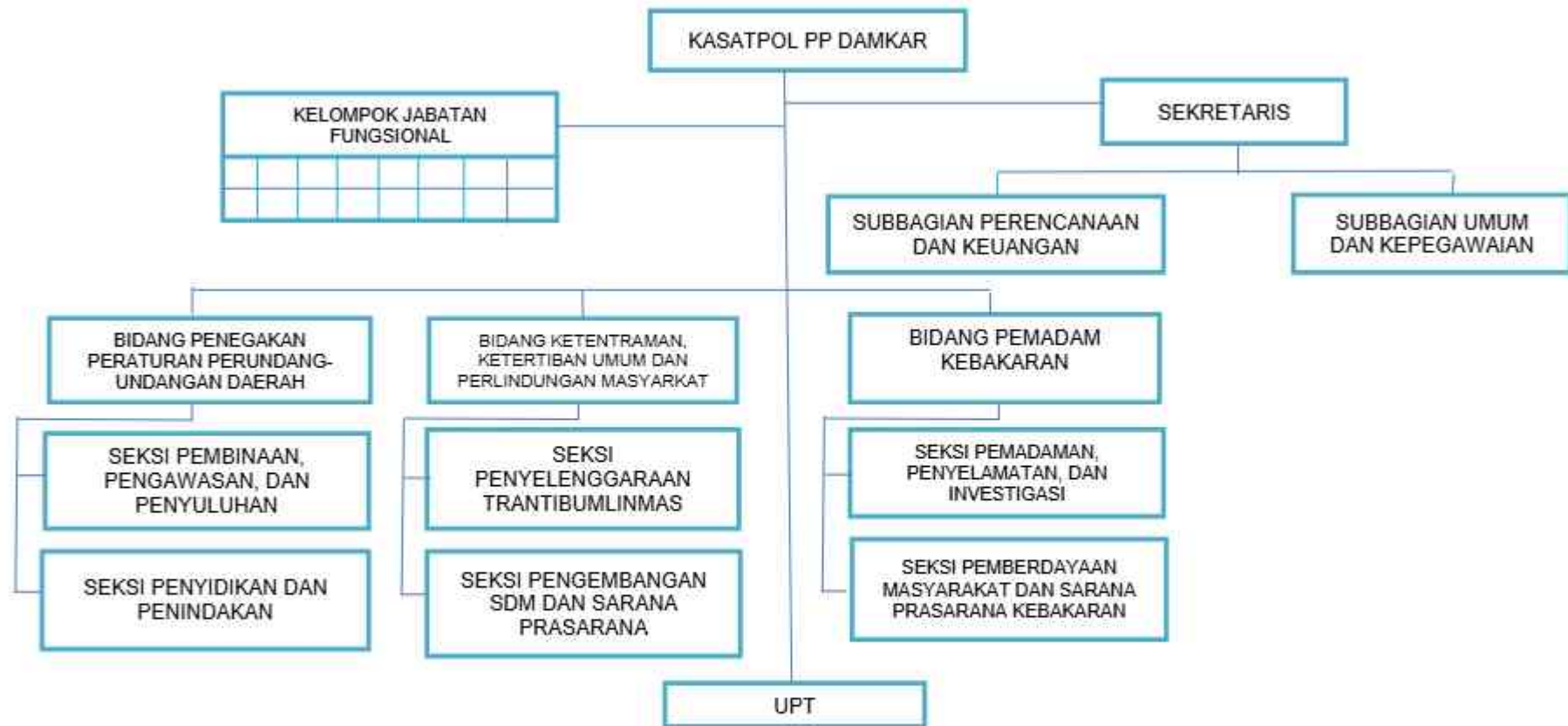
## 2) Fungsi

Satpol PP Damkar dalam menyelenggarakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang penegakan Perda dan perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP Damkar;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 disajikan dalam *Gambar 1.1 Bagan Organisasi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo* sebagai berikut:

Gambar 1.1  
 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo



### 1.3.2. Sumber Daya Manusia

#### 1) Susunan Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak 108 orang PNS dan PPPK yang terdiri dari 88 laki-laki dan 20 perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut:

#### a. Berdasarkan Golongan (ASN)

Tabel: 1.1  
Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Golongan

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								0
Golongan IV/d								0
Golongan IV/c								0
Golongan IV/b		1	1				1	3
Golongan IV/a			2	1				3
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Golongan III/d			1	1			1	3
Golongan III/c				5		1	1	7
Golongan III/b				1		1	4	6
Golongan III/a						2	11	13
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
Golongan II/d							7	7
Golongan II/c						6	2	8
Golongan II/b							1	1
Golongan II/a								0
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
Golongan I/d								0
Golongan I/c								0
Golongan I/b								0
Golongan I/a								0
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>								<b>0</b>
JUMLAH PPPK GOLONGAN 1							1	1
JUMLAH PPPK GOLONGAN 5							55	55
JUMLAH PPPK GOLONGAN 7							1	1

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
JUMLAH PPPK GOLONGAN 9								0
JUMLAH PPPK GOLONGAN 10								0
JUMLAH PPPK								57
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>108</b>

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Desember)

#### b. Berdasarkan Pangkat

Tabel: 1.2

Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Pangkat

No.	Berdasarkan Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama	0
2	Pembina Utama Madya	0
3	Pembina Utama Muda	0
4	Pembina Tk. I	3
5	Pembina	3
6	Penata Tk. I	3
7	Penata	7
8	Penata Muda Tk. I	6
9	Penata Muda	12
10	Pengatur Tk. I	7
11	Pengatur	8
12	Pengatur Muda Tk. I	1
13	Pengatur Muda	1
14	Juru Tk. I	0
15	Juru	0
16	Juru Muda Tk. I	0
17	Juru Muda	0
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Desember)

#### c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel: 1.3

Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Berdasarkan Pendidikan Formal	Jumlah
1	S3	0
2	S2	6
3	S1	13

No.	Berdasarkan Pendidikan Formal	Jumlah
4	D4	3
5	D3	9
6	SMA/SLTA	75
7	SMP	1
8	SD	1
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Desember)

#### d. Berdasarkan Pendidikan Dasar dan Diklat

Tabel: 1.4

Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Pendidikan Dasar dan Diklat

No	Berdasarkan Pendidikan Dasar dan Diklat	Jumlah
1.	Diklat Pimpinan II	1
2.	Diklat Pimpinan III	3
3.	Diklat Pimpinan IV	2
4.	Diklat PPNS	3
5.	Diklat Dasar Pol PP	29
6.	Diklat Damkar	38
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Desember)

#### e. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel: 1.5

Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	88
2	Perempuan	20
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Desember)

#### f. Berdasarkan Usia

Tabel: 1.6

Pegawai Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Berdasarkan Usia	Jumlah
1	20 - 35 tahun	41
2	36 - 55 tahun	57
3	≥ 56 tahun	10
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Desember)

## 2) Perlengkapan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo menempati gedung kantor dengan alamat di Jalan Kyai Brengkel No. 28 Purworejo terdiri dari gedung kantor, tempat parkir dan halaman. Adapun aset Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo meliputi antara lain:

Tabel 1.6  
Inventaris Tanah Satpol PP Damkar Kab. Purworejo

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (m2)
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.572
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	539

Sumber Data: Data KIB (A) Satpol PP Damkar Tahun 2025 (Desember)

Tabel 1.7  
Inventaris Peralatan dan Mesin Satpol PP Damkar Kab. Purworejo

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Layak	Tidak Layak	
1.	Air Compressor	3	3	0	
2.	Portable generating set	1	1	0	
3.	Stationary generating set	1	1	0	
4.	Electric generating set lainnya (dst)	1	1	0	
5.	Portable water pump	2	2	0	
6.	Pompa Air	3	3	0	
7.	Station Wagon	5	5	0	
8.	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2	2	0	
9.	Truck + Attachment	2	2	0	
10.	Pick up	2	2	0	1 Pinjam Pakai ke Polres
11.	Sepeda Motor	11	11	0	
12.	Mobil Pemadam Kebakaran	6	6	0	
13.	Mobil Tangki Air	1	1	0	
14.	Gergaji Chain Saw	1	1	0	
15.	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	1	0	
16.	Perkakas khusus (special tools) lainnya (dst)	1	1	0	
17.	Lemari besi/metal	20	20	0	
18.	Lemari kayu	1	1	0	
19.	Rak besi	2	2	0	

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Layak	Tidak Layak	
20.	Rak kayu	2	2	0	
21.	Filing cabinet besi	8	8	0	
22.	Filing cabinet kayu	2	2	0	
23.	Brandkas	1	1	0	
24.	Kardex kayu	2	2	0	
25.	Papan pengumuman	2	2	0	
26.	Alat kantor lainnya	8	8	0	
27.	Meja kerja kayu	2	2	0	
28.	Kursi besi/metal	5	5	0	
29.	Kursi kayu	8	8	0	
30.	Sice	1	0	1	Rusak berat
31.	Meja rapat	6	6	0	
32.	Meja 1/2 Biro	53	50	3	3 Rusak berat
33.	Kursi rapat	50	50	0	
34.	Kursi putar	15	11	4	4 Rusak berat
35.	Kursi biasa	2	2	0	
36.	Bangku tunggu	1	1	0	
37.	Kursi lipat	53	53	0	
38.	Sofa	2	2	0	
39.	Lemari es	1	1	0	
40.	AC window	1	1	0	
41.	AC split	4	4	0	
42.	Kipas angin	1	1	0	
43.	Televisi	1	1	0	
44.	Sound system	1	1	0	
45.	Wireless	1	1	0	
46.	Megaphone	3	3	0	
47.	Tustel	2	2	0	
48.	Timbangan barang	1	1	0	
49.	Dispenser	1	1	0	
50.	Bracket Standing Peralatan	1	1	0	
51.	Alat rumah tangga lain-lain	39	39	0	
52.	Alat Pemadam/ Portable	8	8	0	
53.	Pakaian panas/lengkap	20	20	0	
54.	Alat pembantu kebakaran	34	34	0	
55.	Alat pemadam kebakaran lainnya	3	3	0	
56.	Meja kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0	

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Layak	Tidak Layak	
57.	Meja kerja pegawai non structural	13	13	0	
58.	Kursi kerja pegawai non structural	25	25	0	
59.	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	5	3	2	2 Rusak Berat
60.	Buffet kayu	1	1	0	
61.	Automatic emergency light	3	3	0	
62.	Layar film/projector	1	1	0	
63.	Pesawat Telephone	1	1	0	
64.	Handy Talky (HT)	46	46	0	
65.	Facsimile	1	1	0	
66.	Unit transceiver VHF Portable	1	1	0	
67.	Wireless amplifier	1	1	0	
68.	Alat Komunikasi Lainnya	2	2	0	
69.	Peralatan pemancar mf/mw lainnya (dst)	1	1	0	
70.	Antena VHF/ FM Stationary	2	2	0	
71.	Alat khusus keamanan lainnya	6	6	0	
72.	PC Unit	16	15	1	1 Rusak Berat
73.	Laptop	20	19	1	1 Rusak Berat
74.	Personal komputer lainnya	3	1	2	2 Rusak Berat
75.	Printer (peralatan personal komputer)	16	16	0	
76.	Scanner (peralatan personal komputer)	1	1	0	
77.	Rambu tidak bersuar lainnya (dst)	99	98	1	1 Rusak Berat
78.	Spycam Topi	2	2	0	
79.	Spycam Pen	1	1	0	
80.	Repeater / Alat Penangkap Sinyal	1	1	0	
81.	Drone	1	1	0	
82.	Action Cam	2	2	0	
83.	Paket CCTV - Kaliboto, Perbatasan Purworejo - Magelang	1	1	0	
84.	Paket CCTV - Lokasi Jogoboyo	1	1	0	
85.	Alat Pendeteksi Pita Cukai	25	25	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>710</b>	<b>695</b>	<b>15</b>	

Sumber Data: KIB B Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Desember)

Tabel 1.8  
Inventaris Gedung dan Bangunan Satpol PP Damkar Kab. Purworejo

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Kondisi Bangunan	Keterangan
1.	Bangunan gedung kantor permanen (gd. SatpolPP Damkar)		Baik	
2.	Bangunan gedung kantor lain-lain (Papan Nama)	0,6	Baik	
3.	Bangunan gedung kantor lain-lain (Aula dan R. Kasat PolPP Damkar)		Baik	
4.	Bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst) (Pos Damkar Kutoarjo)		Baik	
5.	Bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst) (Kantor Induk)		Baik	
6.	Bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst) (Pos Damkar Purwodadi)		Baik	
7.	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen (Mushola)	54	Baik	
8.	Bangunan Gedung Kantor (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	96	Baik	Belanja Modal Tahun 2025 (Diusulkan penetapan status penggunaan)

Sumber Data : Data KIB (C) Satpol PP Damkar Tahun 2025 (Desember)

Tabel 1.9  
Inventaris Jalan, Irigasi, dan Jaringan Satpol PP Damkar Kab. Purworejo

No	Jenis Barang>Nama Barang	Konstruksi
1.	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (dst)	Sumur Bor

Sumber Data : Data KIB (D) Satpol PP Damkar Tahun 2025 (Desember)

### 1.3.3. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo menerima alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp13.693.543.236,00. Setelah dilakukannya APBD Perubahan, total alokasi anggaran menjadi Rp12.389.177.238,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo.

Struktur Belanja Daerah Satpol PP Damkar tahun 2025 tersebut terdiri dari:

1. Belanja Operasi: Mengalami penyesuaian dari semula Rp13.151.543.236,00 menjadi Rp11.334.135.238,00, yang mencakup Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa.
2. Belanja Modal: Mengalami peningkatan dari Rp542.000.000,00 menjadi Rp1.055.042.000,00, yang meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Alokasi anggaran Belanja Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 mengalami penyesuaian. Dari pagu awal sebesar Rp8.120.643.820,00, pada APBD Perubahan menjadi Rp7.977.506.881,00. Penurunan sebesar Rp143.136.939,00 ini disebabkan oleh penghitungan kembali beban belanja pegawai sebagai dampak dari rotasi kerja dan pegawai yang memasuki masa purna tugas (pensiun).

Kemudian alokasi Belanja Barang dan Jasa Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dari semula Rp5.030.899.416,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp3.356.628.357,00, atau berkurang sebesar Rp1.674.271.059,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung kebijakan nasional program prioritas Presiden. Selain itu, terjadi efisiensi pada belanja jasa tenaga Non ASN seiring dengan pengangkatan tenaga Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selanjutnya pada Belanja Modal, khususnya Belanja Peralatan dan Mesin, terdapat peningkatan alokasi dari semula Rp17.000.000,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp530.042.000,00, atau bertambah sebesar Rp513.042.000,00. Penambahan ini merupakan hasil pergeseran anggaran dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah penyesuaian atas terbitnya Standar Satuan Harga (SSH) yang sebelumnya belum tersedia pada saat penyusunan

anggaran murni, sehingga pemenuhan pada peralatan dan mesin dapat dilakukan pada tahap perubahan.

Sementara itu, alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp525.000.000,00. Pagu anggaran ini tidak mengalami perubahan, baik pada tahap anggaran murni maupun setelah perubahan. Alokasi tersebut sepenuhnya diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) guna meningkatkan efektivitas operasional kegiatan.

#### **1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

##### **1.4.1. Aspek Strategis**

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mengemban Misi keempat yaitu: "Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)", yang mana keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo adalah "Membantu Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dan Penanganan serta Pencegahan Kebakaran".

Beberapa aspek strategis yang menjadi perhatian dalam mendukung pencapaian dan merealisasikan misi tersebut dalam hal penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat adalah:

##### **1. Penguatan Sumber Daya Manusia;**

Meningkatkan motivasi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota, baik dalam bidang Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Penegakan Perda dan Perkada; Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; maupun Pelayanan Publik.

2. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi;

Meningkatkan Kerjasama koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal.

3. Penguatan Penegakan Peraturan Daerah (Perda/ Perkada);

Meningkatkan sosialisasi terkait Perda dan Perkada secara intensif kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami aturan yang berlaku, serta melakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelanggar Perda/ Perkada.

4. Peningkatan Pelayanan Publik;

Meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat terkait dengan gangguan Trantibumlinmas.

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional;

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang operasional untuk melaksanakan kegiatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik dalam hal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Perda dan Perkada; Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Meningkatkan pemanfaatan media komunikasi/ media sosial untuk meningkatkan komunikasi dengan Masyarakat dan menyebarkan informasi penting serta untuk memudahkan pengelolaan data, pelaporan dan koordinasi.

#### 1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, merupakan kondisi faktual yang perlu diperhatikan. Karena, penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. Adapun isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Banyaknya potensi gangguan trantibum dikarenakan belum optimalnya peran serta Masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kepedulian masyarakat dan kurangnya koordinasi maupun Kerjasama instansi terkait akan pentingnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tersebut;
2. Potensi pelanggaran perda/ perkada dan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi maupun perbatasan antar Kabupaten/ Kota;
3. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP Damkar, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Standar Jumlah Aparatur/Sumber Daya Manusia,

sehingga jumlah anggota Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo masih kurang;

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana sehingga kinerja aparat Satpol PP Damkar kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk didalamnya yang berkaitan dengan waktu tanggap (*Response Time*) pada Pelayanan Pemadam Kebakaran kurang dari 15 menit dari diterimanya laporan kejadian sampai ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan pemadaman/ pengendalian kebakaran;
5. Peran Masyarakat dan kepedulian instansi pemerintah maupun swasta terhadap potensi bahaya kebakaran dan terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran (belum tersedianya alat proteksi kebakaran);
6. Belum terpenuhinya target minimal cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Upaya untuk mewujudkan masyarakat tertib, tentram dan menciptakan iklim yang kondusif yang didukung oleh aparaturnya yang profesional telah dan akan dilakukan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo melalui serangkaian program dan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat berbagai aspek terkait dengan penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah mengalami banyak kemajuan atau keberhasilan, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui program dan kegiatan secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **1. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **2. Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

## **3. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

### **a. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025**

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **b. Realisasi Anggaran Tahun 2025**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Inovasi

Pada sub bab ini diuraikan inovasi-inovasi yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi.

d. Penghargaan

Pada sub bab ini diuraikan penghargaan-penghargaan yang telah diterima dalam Tahun Anggaran 2025.

#### **4. Bab IV Penutup**

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dan rencana tindak lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **5. Lampiran**

1. Daftar Referensi;
2. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2025;
3. SK Penetapan LKjIP;
4. PK PD Murni dan Perubahan Tahun 2025;
5. Laporan Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
6. SK IKU Perangkat Daerah;
7. Hasil SKM Tahun 2025;
8. Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan;
9. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD**

Tujuan dan sasaran strategis merupakan acuan utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. Hal ini disusun untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran yang telah ditetapkan berorientasi pada hasil demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Purworejo. Berikut adalah rincian Tujuan, Sasaran, serta Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2025:

1) Tujuan:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.
- b. Peningkatan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

2) Sasaran

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  
Indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.
- b. Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam hal ini tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 terdapat perubahan pada saat dilaksanakan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu pada target capaian Tujuan dan Sasaran yang tersaji dalam Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sebelum: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Sebelum: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93,05	93,10				
	Sesudah: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Sesudah: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			88,31	88,32	88,33	88,34
		Sebelum: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Sebelum: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93,05	93,10				
		Sesudah: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Sesudah: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			88,31	88,32	88,33	88,34
2	Sebelum: Peningkatan Pelayanan Trantibum dan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar		Sebelum: Persentase Pelayanan Trantibum dan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar	100%	100%				

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Sesudah:</b> Peningkatan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)		<b>Sesudah:</b> Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)			100%	100%	100%	100%
		<b>Sebelum:</b> Meningkatnya Pelayanan Trantibum Yang sesuai standar	<b>Sebelum:</b> Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat diselesaikan	100%	100%				
		<b>Sebelum:</b> Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar	<b>Sebelum:</b> Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	100%	100%				
		<b>Sesudah:</b> Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	<b>Sesudah:</b> Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)			100%	100%	100%	100%

Upaya untuk mewujudkan masyarakat tertib, tenteram dan menciptakan iklim yang kondusif yang didukung oleh aparatur yang profesional telah dan akan dilakukan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo melalui serangkaian program dan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat berbagai aspek terkait penegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat yang telah mengalami banyak kemajuan atau keberhasilan, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu

ditangani melalui program dan kegiatan secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Sasaran, arah kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo bidang keamanan adalah mewujudkan iklim kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah.
- b. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo, adalah meningkatkan penegakan hukum dan HAM untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah.

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Sejalan dengan hal tersebut maka strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan terciptanya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, serta mendukung arah kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

*Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026*

No.	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	a. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten dalam Keahlian dan Keilmuan
		b. Peningkatan komitmen, konsistensi dan tanggungjawab untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
		c. Peningkatan Sarana dan Prasaran untuk mendukung Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
		d. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada Masyarakat
2.	Meningkatkan Profesionalisme SDM	a. Peningkatan Rasio Pegawai dengan Kompetensi Teknis dan mental yang handal (Produktif, Profesional dan Proporsional) serta Peduli, Efektif, dan Efisien dalam Pelayanan Publik sesuai dengan Bidang Tugasnya

No.	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
3.	Meningkatkan Pencegahan Gangguan Trantibumlinmas	a. Peningkatan Deteksi Dini, Pelaksanaan Patroli dan Pengamanan
4.	Meningkatkan Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	a. Pendekatan secara humanis dalam melaksanakan Penanganan Gangguan Trantibumlinmas
		b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi terkait terhadap kewenangan dalam penanganan gangguan Trantibumlinmas secara tuntas
		c. Peningkatan Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan terhadap Potensi-potensi yang Menimbulkan Kerawanan Gangguan Trantibum
		d. Peningkatan Layanan dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada secara Profesional dan sesuai dengan SOP
		e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam mendukung Cipta Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.	Meningkatkan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pemadam Kebakaran
		2. Peningkatan Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
		3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam penanggulangan bencana kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
		4. Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam mendukung Upaya Cegah Dini Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran

### 2.3. Struktur Program Tahun 2025

Program merupakan kerangka rencana aksi sistematis Perangkat Daerah yang disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Guna menjamin efektivitas pencapaian target kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Purworejo menyusun struktur belanja yang terdiri dari Program, Kegiatan, hingga Sub-Kegiatan. Struktur ini

dipastikan selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra), perencanaan tahunan (Renja) dan dengan dokumen perencanaan di atasnya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun Program yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Purworejo Tahun 2025 meliputi:

Tabel 2.3  
Program Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo				Rp12.389.177.238,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	Rp8.564.252.681,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	100%	Rp2.822.647.597,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	Rp1.002.276.960,00
						Rp12.389.177.238,00

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025 berdasarkan format Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo

Table 2.4  
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,33
2.	Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp8.878.474.936,00	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp3.457.106.800,00	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp1.357.961.500,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp13.693.543.236,00</b>	<b>APBD</b>

b. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo

Table 2.5  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,33
2.	Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp8.564.252.681,00	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp2.822.647.597,00	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp1.002.276.960,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp12.389.177.238,00</b>	APBD

Secara keseluruhan, tidak ada perubahan pada aspek target capaian kinerja meskipun terjadi pergeseran anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP Damkar berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas layanan dengan sumber daya yang lebih efisien.

- a. Sasaran strategis I "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tetap pada target 88,33;
- b. Sasaran strategis II "Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)" dengan indikator sasaran Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) baik pada urusan Trantibumlinmas maupun Pemadam Kebakaran, target tetap bertahan di angka 100%;
- c. Terjadi penurunan total anggaran sebesar Rp1.304.365.998,00 (dari Rp13.693.543.236,00 menjadi Rp12.389.177.238,00).
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
Anggaran murni Rp8.878.474.936,00 pada Anggaran Perubahan Rp8.564.252.681,00 atau berkurang sebesar Rp314.222.255,00.
  - 2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Anggaran murni Rp3.457.106.800,00 pada Anggaran Perubahan Rp2.822.647.597,00 atau berkurang sebesar Rp634.459.203,00.

3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Anggaran murni Rp1.357.961.500,00 pada Anggaran Perubahan Rp1.002.276.960,00 atau berkurang sebesar Rp355.684.540,00.

Berdasarkan data yang telah disampaikan, penurunan anggaran ini dapat dijelaskan bahwa penurunan pada ketiga program disebabkan oleh kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung kebijakan nasional program prioritas Presiden. Serta efisiensi pada belanja jasa tenaga Non ASN seiring dengan pengangkatan tenaga Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu juga adanya penghitungan kembali beban belanja pegawai sebagai dampak dari rotasi kerja dan pegawai yang memasuki masa purna tugas (pensiun). Meskipun total anggaran program menurun, akan tetapi telah dilakukan penyesuaian pada Belanja Modal seperti pembangunan sarana dan prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) dan pengadaan alat mesin melalui penyesuaian SSH untuk memastikan sarana prasarana tetap terpenuhi guna meningkatkan efektivitas operasional kegiatan dimana penurunan anggaran tidak menurunkan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan di awal tahun.

## **2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024**

Hasil tindak lanjut tahun 2024 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Table 2.6  
 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024 Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo

No.	Rencana Tindak Lanjut/ Rekomendasi	Hasil Tindak Lanjut
<b>A. Tindak Lanjut Tahun 2024</b>		
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dan mengusulkan kebutuhan personil melalui pengadaan ASN	<p>Pada tahun 2025 Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo telah melaksanakan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP Damkar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan Teknis Rescue Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Pada Selasa 14 Januari 2025 sd Kamis 16 Januari 2025;</li> <li>2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran pada Selasa 24 Juni 2025 s.d Rabu 25 Juni 2025;</li> <li>3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal pada hari Rabu, 19 Maret 2025 dan 6 Agustus 2025 bertempat di DEMAJI Eco Park Purworejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo;</li> <li>4. Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo diadakan selama 1 hari, pada hari Rabu, 3 Oktober 2025 bertempat di Coffe &amp; Resto Satria Bogowonto, Kecamatan Purworejo;</li> <li>5. Mengoptimalkan program Pengembangan Kapasitas melalui metode pembelajaran mandiri secara daring (<i>online learning</i>) serta keikutsertaan dalam berbagai seminar/webinar strategis, sehingga setiap personil tetap mendapatkan pembaruan regulasi dan teknis operasional tanpa mengganggu pelaksanaan kegiatan.</li> </ol> <p>Dalam upaya penguatan kapasitas personil dan penataan status kepegawaian, pada tahun anggaran 2025 Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo telah merealisasikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPPK Tahap I untuk tenaga Satpol PP sejumlah 16 (enam belas) orang, tenaga Pemadam Kebakaran sejumlah 24 (dua puluh empat) orang;</li> <li>2. PPPK Tahap II untuk tenaga Satpol PP sejumlah 1 (satu) orang dan tenaga Pemadam Kebakaran sejumlah 1 (satu) orang;</li> <li>3. PPPK Paruh Waktu sejumlah 1(satu) orang tenaga Satpol PP.</li> </ol>
2.	Melaksanakan pembinaan oleh Kasatpol PP Damkar maupun dari bidang Kepegawaian yang menekankan agar anggota Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dapat mematuhi aturan kerja yang berlaku dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab;	Sebagai wujud komitmen terhadap penguatan budaya kerja, pimpinan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo pada semua tingkatan, mulai dari Kepala Perangkat Daerah hingga Pejabat Struktural, secara konsisten melakukan pembinaan internal dengan memanfaatkan setiap momentum. Arahan strategis ini diberikan secara berkesinambungan melalui apel maupun rapat monitoring dan evaluasi, dengan fokus utama pada peningkatan disiplin serta optimalisasi pencapaian target kinerja personil dalam menjalankan tugas-tugas operasional di lapangan

No.	Rencana Tindak Lanjut/ Rekomendasi	Hasil Tindak Lanjut
3.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dengan tupoksi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Operasi Gabungan bersama unsur TNI, Polri beserta dinas terkait dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada di wilayah Kabupaten Purworejo;</li> <li>2. Terwujudnya Rencana Pengamanan Bersama pada kegiatan besar di wilayah Kabupaten Purworejo (seperti Hari Jadi Kabupaten Purworejo, Nataru dll).</li> <li>3. Terlaksananya koordinasi di tingkat kecamatan untuk mendukung deteksi dini gangguan trantibum melalui patroli rutin;</li> <li>4. Tersusunnya Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);</li> <li>5. Sinergitas penanganan kebakaran antarwilayah melalui koordinasi aktif dengan pemadam kebakaran dari kabupaten tetangga (seperti Kab. Magelang, Kota Magelang, Kebumen, dan Kulon Progo);</li> <li>6. Terlaksananya koordinasi terkait dengan Perencanaan maupun Keuangan guna pemenuhan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>7. Terlaksananya Rekonsiliasi Data Pegawai pasca-pengangkatan PPPK guna memastikan hak administrasi dan penggajian pegawai tepat waktu.</li> </ol>
4.	Pengadaan sarana prasarana untuk memaksimalkan pelayanan yang menunjang capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran dengan cara menganggarkan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut dalam setiap pengusulan anggaran setiap tahunnya	<p>Pada Tahun 2025 Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo melaksanakan pengadaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) serta Pengadaan Seragam PPNS, HT, Spy Cam, Senter UV, Repeater, Laptop, Drone, Action Cam, CCTV untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda Perkada maupun Penyelenggaraan Trantibumlinmas;</li> <li>2. Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk keg kantor lainnya (Arit Bendo, Kanebo, Kikir, Kompor Gas, Spalk Kayu <i>First Aid</i>) serta Pengadaan Pakaian Tahan Api, Pengadaan bahan2 lainnya (Pembersih, Sarung Tangan, Selang Gas, Regulator) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Damkar.</li> </ol>
5.	Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya kesadaran hukum serta kepedulian terhadap trantibumlinmas;	<p>Sepanjang tahun anggaran 2025, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo secara proaktif telah melaksanakan serangkaian program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta kepedulian terhadap Trantibumlinmas. Upaya preventif dan preemtif ini dilakukan melalui berbagai kanal strategis, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satpol <i>Go to School</i>: Program internalisasi nilai-nilai kepatuhan hukum dan pembentukan karakter sadar ketertiban bagi generasi muda di lingkungan pendidikan.</li> <li>2. Koordinasi Pemangku Kepentingan Usaha: Melakukan dialog intensif dengan pemilik usaha hiburan umum, hotel, kos, dan restoran/rumah makan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi daerah serta terciptanya iklim usaha yang tertib.</li> <li>3. Pembinaan Pelanggar: Penerapan pendekatan persuasif melalui pembinaan langsung kepada para pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran dan bersedia berkontribusi aktif dalam menjaga trantibumlinmas.</li> </ol>

No.	Rencana Tindak Lanjut/ Rekomendasi	Hasil Tindak Lanjut
6.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat serta pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran (REDKAR).	<p>Pada tahun 2025, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo secara konsisten melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Upaya ini difokuskan pada peningkatan ketangguhan masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, serta penguatan kelembagaan relawan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi dan Sosialisasi Kebakaran dan Non Kebakaran: Pelaksanaan kunjungan edukatif oleh personel Damkar ke berbagai instansi pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan, serta memfasilitasi kegiatan edukasi langsung bagi masyarakat yang berkunjung ke Mako Satpol PP Damkar.</li> <li>2. Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR): Melakukan pembentukan kelompok relawan di tingkat wilayah (Desa/kelurahan) guna memperluas jangkauan penanganan dini kebakaran.</li> <li>3. Pembinaan dan Pelatihan Teknis REDKAR: Menyelenggarakan pelatihan bagi anggota REDKAR untuk meningkatkan keterampilan teknis pemadaman awal dan prosedur penyelamatan, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara petugas profesional dan masyarakat.</li> </ol>
<b>B. Rekomendasi SAKIP tahun 2025</b>		
1.	PERENCANAAN KINERJA	
	<p>a. Melakukan upaya inovatif yang bisa dihargai untuk pemenuhan kriteria yang ditetapkan atas kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan perencanaan kinerja.</p> <p>b. Melengkapi bukti dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.</li> <li>2) perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Screenshot</i> Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan;</li> <li>2. BA tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi Hasil Evaluasi Capaian / Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan 1 s.d 4 Tahun 2024 dan Triwulan 1 Tahun 2025;</li> <li>3. Tidak terdapat bukti pimpinan OPD terlibat langsung dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan seperti daftar hadir, notulen rapat baik pada rakor penyusunan maupun pencapaian kinerja Rapat Koordinasi Terkait Progress Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>4. Terdapat Banner Maklumat komitmen bersama yang ditandatangani seluruh pegawai/Surat komitmen bersama yang ditandatangani seluruh pegawai;</li> </ol>

No.	Rencana Tindak Lanjut/ Rekomendasi	Hasil Tindak Lanjut
2.	PENGUKURAN KINERJA	
	<p>a. Menyusun Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja;</p> <p>b. Melakukan upaya inovatif yang bisa dihargai untuk pemenuhan kriteria yang ditetapkan atas pengukuran kinerja dan implementasi pengukuran kinerja;</p> <p>c. Pengukuran Kinerja agar sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.</p> <p>d. Pengukuran kinerja agar sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (Refocussing) Organisasi.</p>	<p>Terdapat bukti dokumen atas mekanisme dalam pengumpulan data kinerja, seperti: SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja. SOP terkait, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Surat Keluar;</li> <li>2. SOP Pembuatan Pelaksanaan Kegiatan;</li> <li>3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja.</li> </ol>
3.	PELAPORAN KINERJA	
	<p>a. Informasi dalam laporan kinerja agar sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan.</p> <p>b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.</p> <p>c. Informasi dalam laporan kinerja berkala agar sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</p> <p>d. Informasi dalam laporan kinerja agar sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.</p> <p>e. Melakukan upaya inovatif yang bisa dihargai untuk pemenuhan kriteria yang ditetapkan atas penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan kinerja Bulanan, Triwulanan, Semesteran;</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi kepada pegawai;</li> <li>3. Menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP 2024);</li> <li>4. LKjIP 2025 dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan</li> </ol>

No.	Rencana Tindak Lanjut/ Rekomendasi	Hasil Tindak Lanjut
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERN	
	<p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar sepenuhnya dilaksanakan secara berjenjang.</p> <p>b. Seluruh unit kerja agar melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.</p> <p>c. Memenuhi seluruh kriteria penilaian untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern dan mempertahankan setidaknya 1 tahun terakhir.</p> <p>d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan pada seluruh unit kerja.</p> <p>e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).</p> <p>f. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar seluruhnya ditindaklanjuti.</p> <p>g. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.</p> <p>h. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.</p> <p>i. Perbaikan dan peningkatan kinerja agar sepenuhnya dimanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p> <p>j. Melakukan upaya inovatif yang bisa dihargai untuk pemenuhan kriteria yang ditetapkan atas Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan peningkatan pemanfaatan Implementasi SAKIP.</p>	<p>1. LHE SAKIP;</p> <p>2. Tindaklanjuti Rekomendasi Implementasi SAKIP Tahun 2025</p>

## 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung capaian kinerja adalah sarana yang digunakan untuk membantu dan memastikan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Instrumen Pendukung Capaian

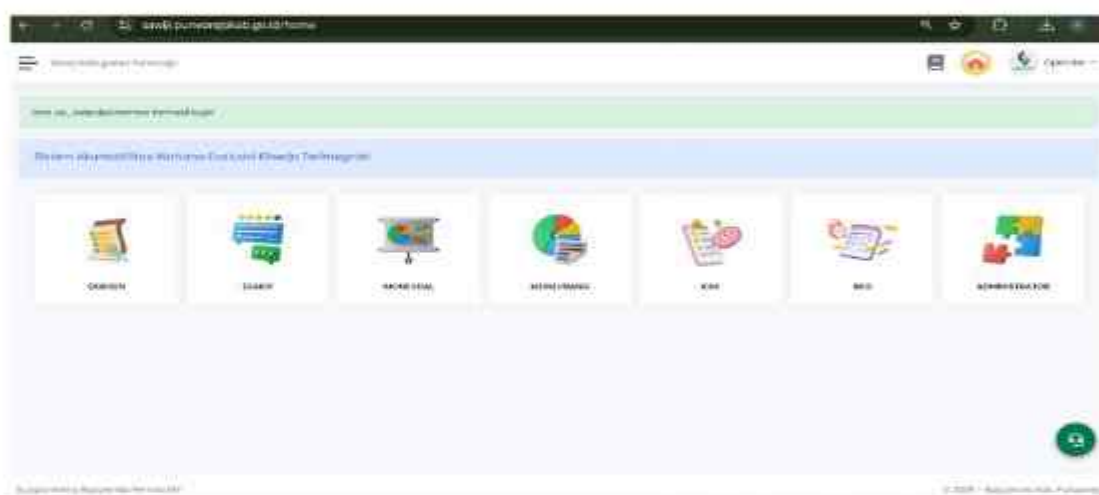
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo tahun 2025 sebagai berikut:

## 1. SAWIJI

Sawiji adalah Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SAWIJI) yang merupakan Sistem Informasi Untuk Konsistensi Data Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Integrasi Data Realisasi Keuangan dan realisasi Kinerja Indikator yang diharapkan dalam satu kali input data dapat menghasilkan banyak laporan, sehingga adanya aplikasi sistem informasi tersebut dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pelaporan.

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://sawiji.purworejokab.go.id/>

Gambar 2.1  
Screenshoot aplikasi SAWIJI



## 2. E-Kinerja BKN

Aplikasi e-Kinerja BKN adalah platform digital yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengelola kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aplikasi e-Kinerja BKN terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://kinerja.bkn.go.id/>

Gambar 2.2  
Screenshoot aplikasi E-Kinerja BKN

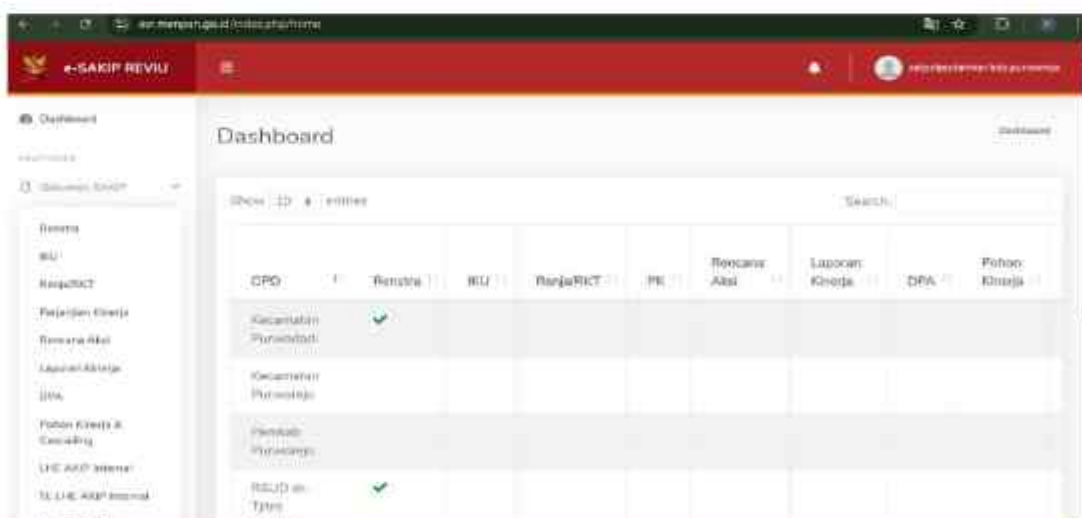


### 3. ESR Menpan

Aplikasi e-sakip adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan kinerja instansi pemerintah. Aplikasi ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dirancang untuk meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintah. SAKIP juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih. Fungsi aplikasi e-sakip adalah: Mengumpulkan data, Mengklarifikasikan data, Mengikhtisarkan data, Melaporkan kinerja instansi pemerintah.

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://esr.menpan.go.id/>

Gambar 2.3  
Screenshoot aplikasi ESR Menpan



#### 4. ESPM Kemendagri

Aplikasi pelaporan data dan informasi yang akan menjadi bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal), dimana SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, meliputi urusan Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial.

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

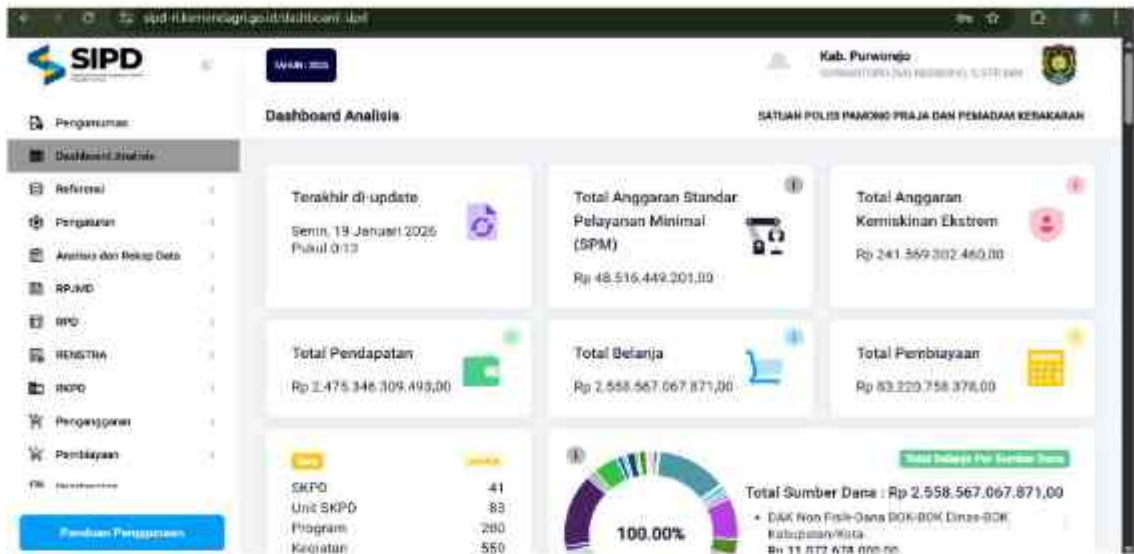
Gambar 2.4  
Screenshoot aplikasi E-SPM Kemendagri



#### 5. SIPD-RI

Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintah daerah. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

Gambar 2.5  
Screenshoot aplikasi SIPD-RI



## 6. SIMKEUDA

SIMKEUDA merupakan perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <http://simkeuda.purworejokab.go.id/>

Gambar 2.6  
Screenshoot aplikasi SIMKEUDA

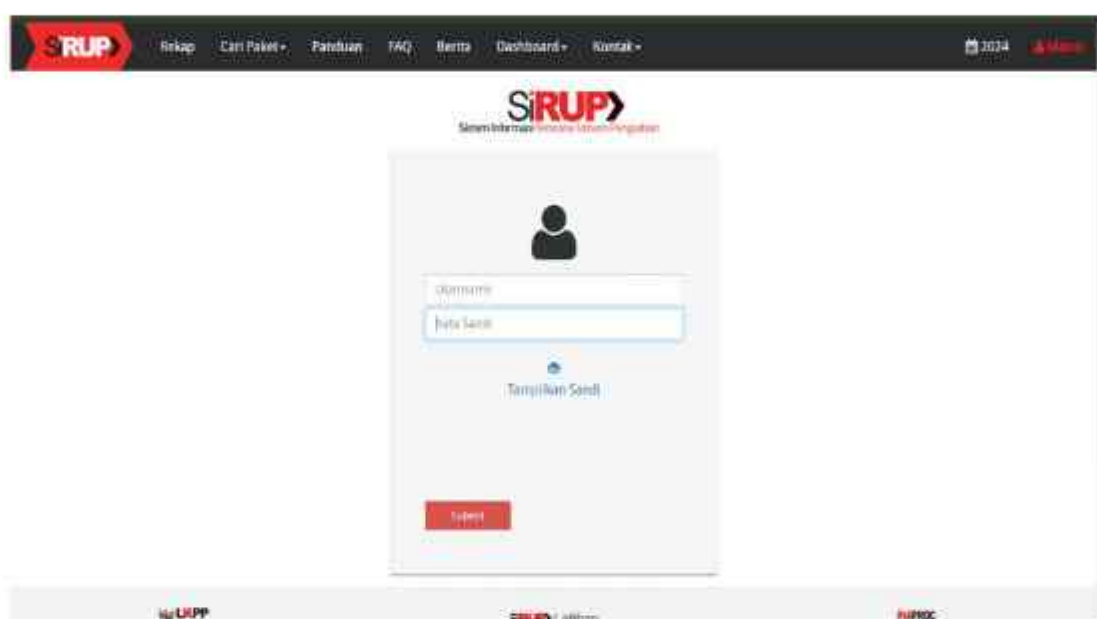


## 7. SIRUP

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah aplikasi yang berbasis Website (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://sirup.lkpp.go.id/>

Gambar 2.7  
Screenshoot aplikasi SIRUP



## 8. Website Satpol PP Damkar Kab. Purworejo

Situs web resmi yang dikelola oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Website ini berfungsi sebagai media informasi dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar kabupaten Purworejo yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Pada Website ini juga dilengkapi dengan sarana aduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan pesan/ aduan adanya gangguan Trantibumlinmas kepada Satpol PP Damkar Kab. Purworejo dengan cepat dan tepat waktu. Selain itu aplikasi tersebut juga menjadi instrumen pendukung capaian kinerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo.

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://satpolppdamkar.purworejokab.go.id/>

Gambar 2.8  
Screenshoot aplikasi Website Satpol PP Damkar Kab. Purworejo



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program selama Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini dilakukan secara periodik (bulanan, semesteran, dan tahunan) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja terhadap target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Proses ini bertujuan untuk memetakan keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian program kerja, sebagai dasar pengambilan langkah strategis untuk perbaikan berkelanjutan. Adapun ringkasan pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut:

*Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja*

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian
2	Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terlaksananya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Capaian Program Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran /2 *100

Target dan Realisasi Kinerja atau Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Sasaran Strategis pada Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Kinerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,32	88,33	88,33	100%	Sangat Baik
2.	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Indikator kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" adalah "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah".

Indikator kinerja sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah "Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)".

Kedua Sasaran berorientasi pada tujuan "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dan "Peningkatan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)" dan merupakan salah satu upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo untuk mencapai misi ke empat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 "Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)" yang mana keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo adalah "Membantu Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman

dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dan Penanganan serta Pencegahan Kebakaran”.

1. Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” tersebut adalah Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.

Formula perhitungan indikator kinerja sasaran tersebut adalah:

= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian.

Implementasi Formula adalah:

Nilai IKM Tahun 2025 terdiri dari:

- 1) Nilai IKM Semester I= 93,10
- 2) Nilai IKM Semester II = 88,33

Nilai IKM 2025 adalah mengambil nilai IKM semester terakhir (II) yaitu 88,33. Berikut analisis capaian kinerja pada sasaran tersebut.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada Semester I, nilai IKM mencapai angka 93,10, sedangkan pada Semester II tercatat sebesar 88,33. Meskipun terdapat penurunan/ perubahan nilai antar semester, nilai rata-rata akhir tahun tetap berhasil memenuhi target sasaran yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja sebesar 88,33. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga pada kategori 'Sangat Baik' di tengah adanya penyesuaian anggaran dan struktur organisasi.

2. Definisi operasional dari indikator kinerja sasaran "Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)" adalah Terlaksananya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Formula perhitungan capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah:

*= Capaian Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran / 2 \* 100*

Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan hasil pelaksanaan program pada tahun anggaran 2025, diperoleh data capaian sebagai berikut:

- a. Capaian Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 = 100%
- b. Capaian Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tahun 2025 = 100%

Dengan demikian, perhitungan akhir untuk indikator sasaran ini adalah  $= (100\% + 100\%) / 2 = 100\%$

Perbandingan dan Kategori Kinerja Realisasi kinerja sasaran strategis ini menunjukkan keberhasilan yang optimal. Jika dibandingkan antara Target (100%) dengan Realisasi (100%), maka capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 100%. Capaian yang konsisten dengan tahun 2024 ini menempatkan kinerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam kriteria penilaian "Sangat Baik".

Berikut adalah capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025:

- a. Capaian Program Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025 pada Sasaran I “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Capaian Program terhadap Sasaran I  
Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%
1.		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>100%</i>
a.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
b.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
c.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
d.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
e.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	100%
f.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100%
2.		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%
a.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	71 Orang/bulan	100%
b.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%
c.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 Laporan	26 Laporan	100%
3.		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%
a.		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
b.		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
c.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	100%
4.		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
a.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
b.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	100%
c.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	100%
d.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	9 Paket	100%
e.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	100%
f.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	100%
g.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
h.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
i.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
5.		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>100%</i>
a.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
b.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>100%</i>
a.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
b.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	15 Unit	100%
c.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	25 Unit	100%
d.		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%

- b. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025 pada Sasaran II “Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Capaian Program terhadap Sasaran II  
Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	100%	100%	100%
1.		<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</i>	12 Bulan	12 Bulan	100%
a.		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
b.		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	0 Dokumen	100%

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
c.		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	96 Orang	96 Orang	100%
d.		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
e.		Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan	100%
f.		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	1 Laporan	100%
2.		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
a.		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	100%
b.		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	1 unit	100%
c.		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	3 Laporan	3 Laporan	100%
d.		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
e.		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	100%
f.		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
3.		<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Peningkatan Kinerja Sekretariat PPNS</i>	100%	100%	100%
a.		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
b.		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	12 Laporan	100%
c.		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	100%
III	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		<b>Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran</b>	100%	100%	100%
1.		<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten</i>	100%	100%	100%

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
a.		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
b.		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
c.		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
d.		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	45 Orang	50 Orang	100%
e.		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
f.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 Unit	12 Unit	100%
g.		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Peralatan Proteksi Kebakaran yang sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
a.		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.		<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
a.		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
4.		<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	<i>Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	100%	100%	100%
a.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	290 Orang	290 Orang	100%
b.		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	400 Desa/ Kelurahan	400 Desa/ Kelurahan	100%

Berdasarkan hasil analisis terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 telah **Tercapai**.

Adapun penghitungan predikat kinerja organisasi berdasarkan capaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

$$= \frac{(\text{Jumlah Sasaran Strategis berstatus Tercapai} + \text{Akan Tercapai}) \times 100\%}{\text{Jumlah Sasaran Strategis}}$$

$$= \frac{(2 + 0) \times 100\%}{2} = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, nilai realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah 100%. Pencapaian ini termasuk dalam

kriteria penilaian "Sangat Baik" karena berada pada interval nilai realisasi kinerja ( $91 \leq 100$ ).

**3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

- a. Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap tahun-tahun sebelumnya (2024 dan 2023)

Alat ukur yang digunakan adalah Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya (2024 dan 2023).

- b. Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap tahun-tahun sebelumnya (2024 dan 2023)

Alat ukur yang digunakan adalah Capaian Kinerja 2025 dan Tahun-tahun sebelumnya (2024 dan 2023).

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Alat ukur yang digunakan adalah realisasi PK Tahun 2025, target Tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Target akhir tahun (Tahun 2026) pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Analisis capaian kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berikut tabel capaian kinerja sasaran strategis I (satu):

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2021	Target				Realisasi				Target Akhir RPJMD	Target Akhir RPJMD (realisasi 25/target akhir RPJMD)
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	77	93,1	88,31	88,32	88,33	93,11	88,18	88,32	88,33	88,34	99,99

Indikator kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah”.

Formula perhitungan indikator kinerja sasaran tersebut adalah:

= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian.

Implementasi Formula adalah:

Nilai IKM Tahun 2025 terdiri dari:

- 1) Nilai IKM Semester I= 93,10
- 2) Nilai IKM Semester II = 88,33

Nilai IKM 2025 adalah mengambil nilai IKM semester terakhir (II) yaitu 88,33.

Berikut analisis capaian kinerja pada sasaran tersebut:

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” Tahun 2025 terhadap tahun-tahun sebelumnya (2024 dan 2023) adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Tahun 2025 terhadap 2024 Berdasarkan data realisasi, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 sebesar 88,33 menunjukkan peningkatan tipis jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 88,32. Dengan capaian sebesar 100%, hasil ini masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi”;

2. Perbandingan Tahun 2025 terhadap 2023 Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 89,18, maka capaian tahun 2025 (88,33) berada pada angka 99%. Meskipun terdapat sedikit penurunan, capaian ini tetap dikategorikan dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi";
3. Rekapitulasi Perbandingan Capaian untuk melihat tren kinerja dalam beberapa tahun terakhir, dilakukan penghitungan perbandingan capaian tahun berjalan (2025) terhadap tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

$$\text{Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja} = \frac{(\text{capaian 2025/2024}) + (\text{Capaian 2025/2023})}{2}$$

$$\text{Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja} = \frac{100\% + 99\%}{2} = 99,5\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, rata-rata perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 terhadap beberapa tahun terakhir adalah sebesar 99,5%. Capaian ini secara konsisten menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi".

- 2) Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" Tahun 2025 terhadap tahun-tahun sebelumnya (2024 dan 2023) adalah:
  1. Perbandingan Tahun 2025 terhadap 2024: Bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian tahun 2024 sebesar 100%, maka rasio perbandingannya adalah 100%. Hasil ini termasuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi";
  2. Perbandingan Tahun 2025 terhadap 2023: Bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian tahun 2023 sebesar 101%, maka rasio perbandingannya adalah 99%. Hasil ini tetap berada pada kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi";

3. Penghitungan Capaian: Untuk melihat konsistensi kinerja dalam tiga tahun terakhir, dilakukan penghitungan rata-rata perbandingan capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{capaian 2025/2024}) + (\text{Capaian 2025/2023})}{2}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\% + 99\%}{2} = 99,5\%$$

Berdasarkan hasil analisis di atas, rata-rata perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar 99,5%. Capaian tersebut dikategorikan dalam kriteria penilaian capaian kinerja "Sangat Tinggi". Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mampu mempertahankan stabilitas kualitas pelayanan publik secara konsisten dan optimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" bila dibandingkan antara tahun ini (2025) sebesar 88,33 dengan target Jangka Menengah yang terdapat di dalam Dokumen Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo (2026) sebesar 88,34 capaiannya adalah 99,99%. Hal tersebut dikategorikan dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi".

- b. Sasaran 2: Meningkatkan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berikut tabel capaian kinerja sasaran strategis II (dua):

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	Target				Realisasi				Target Akhir RPJMD	Target Akhir RPJMD (realisasi 25/target akhir RPJMD)
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
1.	Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator kinerja sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah "Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)" bertujuan untuk Peningkatan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Formula perhitungan capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah:

= *Capaian Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran / 2 \* 100*

Capaian Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 = 100%

Capaian Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tahun 2025 = 100%

Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) =  $(100\% + 100\%) / 2 = 100\%$

Berikut analisis capaian kinerja pada sasaran tersebut:

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang

sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2025 terhadap tahun tahun sebelumnya (2024 dan 2023) adalah:

1. Perbandingan Tahun 2025 terhadap 2024: Realisasi kinerja pada tahun 2025 tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga mencapai 100%, maka rasio perbandingannya adalah 100%. Hasil ini termasuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi".
2. Perbandingan Tahun 2025 terhadap 2023: Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2025 (100%) dengan realisasi tahun 2023 (100%), maka diperoleh hasil perbandingan sebesar 100%. Pencapaian ini dikategorikan dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi".
3. Penghitungan Perbandingan Realisasi Kinerja untuk mengukur tren stabilitas kinerja dalam tiga tahun terakhir, dilakukan penghitungan perbandingan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja} = \frac{(\text{capaian 2025/2024}) + (\text{Capaian 2025/2023})}{2}$$

$$\text{Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja} = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa rata-rata perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap tahun 2024 dan 2023 mencapai nilai 100%. Dengan demikian, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo untuk sasaran strategis ini dikategorikan dalam kriteria penilaian "Sangat Tinggi". Hal ini membuktikan komitmen instansi dalam menjaga standar pelayanan minimal secara optimal dan konsisten dari tahun ke tahun.

- 2) Perbandingan Capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2025 terhadap tahun tahun sebelumnya (2024 dan 2023) adalah:

1. Perbandingan Tahun 2025 terhadap 2024: Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 (100%) dengan

capaian tahun 2024 (100%), diperoleh hasil sebesar 100%. Capaian ini termasuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi".

2. Perbandingan Tahun 2025 terhadap 2023: Sejalan dengan hal tersebut, perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 (100%) dengan capaian tahun 2023 (100%) juga menunjukkan hasil sebesar 100%. Capaian ini dikategorikan dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi".
3. Penghitungan Perbandingan Capaian Kinerja untuk mengukur tren stabilitas kinerja dalam tiga tahun terakhir, dilakukan penghitungan perbandingan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{capaian 2025/2024}) + (\text{Capaian 2025/2023})}{2}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, rata-rata perbandingan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo tahun 2025 terhadap tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar 100%. Hasil ini secara konsisten menempatkan instansi dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi", yang mencerminkan stabilitas dan keberhasilan dalam mempertahankan standar pelayanan publik yang optimal.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) bila dibandingkan antara tahun ini (2025) sebesar 100% dengan target Jangka Menengah yang terdapat didalam Dokumen Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo (2026) sebesar 100% capaiannya adalah 100%. Hal tersebut dikategorikan dalam kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi".

### **3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (SPM)**

Berkaitan dengan target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, salah satu sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" berkaitan dengan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sehingga tidak mendukung secara langsung capaian kinerja sasaran tersebut dengan target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Akan tetapi pada sasaran strategis Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo "Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)" termasuk didalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, dimana pada Urusan Trantibumlinmas tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub urusan yang meliputi Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kabupaten; Sub Urusan Kebencanaan; dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota. Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mengampu 2 (dua) sub urusan yaitu sub urusan Trantibum Kabupaten dan sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satpol PP Damkar Tahun 2025 pada sub urusan Trantibum (100%) dan sub urusan Kebakaran (100%). Masing- masing realisasi tersebut dikategorikan dalam Kriteria penilaian Realisasi Kinerja "Sangat Tinggi" atau dalam kategori penilaian pada SPM "Tuntas Paripurna" karena hasil realisasinya sama dengan target (100%). Berikut realisasi pencapaian SPM Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dimana realisasi capaian atau hasil capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2025 dijabarkan melalui penghitungan:

IP Penerima Layanan Dasar:

$$\text{Jumlah yang harus dilayani} = \frac{\text{Jumlah Total yang Harus Dilayani} \times 80\%}{\text{Jumlah Total yang Terlayani}}$$

IP Mutu Minimal Layanan Dasar:

$$\text{Jumlah yang harus dilayani} = \frac{\text{Jumlah Total yang Harus Dilayani} \times 20\%}{\text{Jumlah Total yang Terlayani}}$$

## 1. Sub Urusan Trantibum

Jenis pelayanan adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Jenis Pelayanan pada Sub Urusan Trantibum meliputi:

### a. Penegakan Perda dan Perkada

Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan daerah, meliputi:

- 1) Pengawasan dan Sosialisasi dengan memberikan edukasi dan pendampingan kepatuhan Perda dan Perkada kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- 2) Melakukan tindakan penertiban atau langkah yustisi (proses hukum) maupun non-yustisi terhadap pelanggaran aturan, seperti penertiban reklame tidak berizin, izin bangunan, hingga kepatuhan PKL.
- 3) Penyidikan yang dilakukan melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memproses pelanggaran Perda secara hukum.

### b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Pelayanan ini difokuskan pada terciptanya situasi wilayah yang kondusif, meliputi:

- 1) Pelaksanaan patroli wilayah secara rutin di area publik untuk mencegah terjadinya gangguan Trantibum;
  - 2) Pengamanan objek vital maupun penjagaan terhadap fasilitas pemerintah, serta pengamanan kegiatan protokoler pimpinan daerah;
  - 3) Penanganan gangguan Trantibum melalui penindakan terhadap hal-hal yang mengganggu kenyamanan publik, seperti penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar), pengamen, serta kebisingan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pelayanan ini menitikberatkan pada pemberdayaan unsur masyarakat, diantaranya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dengan melakukan pelatihan bagi anggota Satlinmas dan memberdayakan anggota Satlinmas di tingkat desa/kelurahan untuk membantu pengamanan kegiatan di lingkungan, membantu penanganan bencana, pengamanan Pemilu/Pilkada, kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya serta deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan Trantibum.

Berikut adalah Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan dan IP Mutu Layanan Sub Urusan Trantibum:

Tabel 3.8  
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						Tuntas Paripurna
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	100%
		Jumlah Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Yang Terlayani (Orang)			Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (6 x 80%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	100	123	+23	100%	80%

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (6 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP</p> <p><i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i></p>	268 Unit	268 Unit	0	100%	20%
2.	<p>Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023</p> <p><i>(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i></p>	12 Dokumen	12 Dokumen	0	100%	20%
3.	<p>Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***</p> <p><i>(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</i></p>	34 Orang	34 Orang	0	100%	20%

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (6 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi			
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	2 Dokumen	2 Dokumen	0	100%	20%
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil ( <i>kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat</i> )	2 Orang	2 Orang	0	100%	20%
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan ( <i>pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat</i> )	2 Orang	2 Orang	0	100%	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/ jumlah mutu)</b>						<b>20%</b>

Sumber : Satpol PP

Damkar, Desember 2025

Pada tahun anggaran 2025, pelaksanaan pelayanan dasar di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) telah memenuhi target yang ditetapkan dengan rincian analisis sebagai berikut:

- a. Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar: Realisasi IP Pelayanan Dasar pada tahun 2025 telah berhasil terpenuhi sesuai target, yaitu sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dan

jangkauan pelayanan dasar trantibum kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal.

- b. Indeks Pencapaian (IP) Mutu Layanan: Terkait dengan mutu layanan, khususnya pada mutu layanan pemenuhan standar pelayanan bagi warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material maupun pelayanan pengobatan, tercatat tidak ada aduan masyarakat sepanjang periode pelaporan Januari hingga Desember 2025. Nihilnya aduan ini mencerminkan bahwa tindakan penegakan hukum di lapangan dilakukan secara humanis, profesional, dan sesuai prosedur. Meskipun tidak terdapat kejadian/aduan yang memerlukan penanganan kerugian, IP Mutu Minimal Layanan Dasar tetap dinyatakan terpenuhi sebesar 20%. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan instansi terhadap standar minimal penyediaan sarana, prasarana, dan prosedur kesiapsiagaan dalam merespons dampak penegakan regulasi daerah.

## 2. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Jenis Pelayanan pada Sub Urusan Kebakaran secara garis besar mencakup program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, serta penyelamatan non-kebakaran. Secara teknis, jenis pelayanan ini meliputi:

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran;
- d. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia.

Penanganan Kebakaran merupakan serangkaian tindakan darurat yang dilakukan untuk memadamkan api, mengendalikan kobaran agar tidak meluas, serta melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda dari dampak kebakaran meliputi:

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
- b. Evakuasi dan Penyelamatan Kebakaran;
- c. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.

Penanganan Non Kebakaran dimana pelayanan non-kebakaran difokuskan pada kondisi darurat yang membahayakan keselamatan manusia di luar kejadian api, antara lain:

- a. Evakuasi Penyelamatan Hewan Berbahaya (*Animal Rescue*) seperti: evakuasi ular atau pemusnahan sarang tawon di pemukiman penduduk yang membahayakan warga/ masyarakat.
- b. Evakuasi Pelepasan Cincin;
- c. Evakuasi Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Evakuasi warga yang terjebak didalam sumur/laka sumur;
- e. Evakuasi Pohon Tumbang;
- f. Pembersihan Tumpahan Solar/ BBM di jalan raya; dll

Selain menangani kejadian darurat (kebakaran dan non-kebakaran), Satpol PP Damkar memiliki mandat untuk membangun kemandirian masyarakat melalui:

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;

b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

Berikut adalah Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan dan IP Mutu Layanan Sub Urusan Kebakaran Daerah:

Tabel 3.9  
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan IP Mutu SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						Tuntas Paripurna
		Penerima Pelayanan Dasar				100%
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Yang Terlayani (Orang)	Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 80%)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	50	53	+3	100%	80%
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	38 Layanan	49 Layanan	+11	100%	20%
2.	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	6 Dokumen	6 Dokumen	0	100%	20%
3.	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	520 Unit	520 Unit	0	100%	20%

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi			
4.	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	38 Orang	38 Orang	0	100%	20%
5.	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	40 Orang	40 Orang	0	100%	20%
6.	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	40 Orang	40 Orang	0	100%	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/ jumlah mutu)</b>						<b>20%</b>

Sumber : Satpol PP dan Damkar, Desember 2025

Pada tahun anggaran 2025, Indeks Pencapaian (IP) untuk jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran telah berhasil memenuhi target kumulatif sebesar 100%. Adapun rincian pencapaian berdasarkan indikator penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar: Realisasi IP Pelayanan Dasar tercapai sebesar 80% sesuai dengan target. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan instansi dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penyelamatan serta evakuasi bagi seluruh korban terdampak kebakaran di Kabupaten Purworejo.
- b. Indeks Pencapaian (IP) Mutu Layanan Dasar: Realisasi IP Mutu Layanan Dasar tercapai sebesar 20% sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan tingkat waktu tanggap

(*response time*) 15 (lima belas) menit sejak diterimanya informasi/laporan kejadian kebakaran sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur operasional, kualitas peralatan dan standar teknis aparatur, sebagaimana diatur dalam regulasi SPM Kebakaran. Meskipun demikian, diakui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek pada sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Hal ini menjadi komitmen instansi untuk terus dioptimalkan guna menjamin keberlanjutan mutu layanan yang prima di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis dan pengukuran kinerja pada kedua sub urusan wajib pelayanan dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo telah berhasil memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara optimal, dimana total Indeks Pencapaian (IP) sebesar 100% yang terdiri dari IP Pelayanan Dasar sebesar 80% yang mencerminkan keberhasilan dalam jangkauan layanan dan pemenuhan hak dasar warga negara serta IP Mutu Layanan Dasar sebesar 20% yang mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur teknis dan kualitas layanan di lapangan. Nihilnya aduan masyarakat terkait kerugian materil maupun pelayanan pengobatan dalam proses penegakan regulasi daerah juga menjadi tanda keberhasilan dalam pelayanan pada sub urusan Trantibumlinmas. Hal ini membuktikan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, humanis, dan sesuai SOP. Selain itu pemenuhan *response time* 15 menit pada pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran juga menjadi tanda keberhasilan pada layanan sub urusan kebakaran, meski didukung sarana prasarana yang masih dalam tahap

pengembangan, dedikasi personil dan optimalisasi peralatan yang ada mampu menjaga kualitas pelayanan publik.

#### **3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

##### **1. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" disebabkan:

- a. Keteladanan Kepala Satpol PP Damkar kepada semua karyawan karyawan Satpol PP Damkar dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat;
- b. Kesadaran karyawan dan karyawan Satpol PP Damkar untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat;
- c. Adanya hubungan yang harmonis dalam menjalin koordinasi antar satuan dan instansi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Tekad Satpol PP Damkar untuk mewujudkan *good governance*.
- e. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur layanan Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,952 kemudian unsur layanan Kompetensi Petugas mendapatkan nilai 3,581, serta Perilaku Petugas Pelayanan mendapatkan nilai 3,577 dari hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana.

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah "Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)" disebabkan:

- a. Komitmen dan Kesadaran anggota Satpol PP Damkar untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
  - b. Adanya peraturan / perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang kuat atau mendukung Tupoksi Satpol PP Damkar dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP dan Damkar;
  - d. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan Satpol PP Damkar dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Pelayanan Penegakan Perda dan Perkada; Pemadaman Kebakaran dan Non Kebakaran;
  - e. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;
  - f. Peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran;
  - g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga Trantibumlinmas;
  - h. Pembentukan dan pembinaan REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran) membantu memperluas jangkauan deteksi dini kebakaran di tingkat desa/kecamatan.
2. Faktor Penyebab Kendala (Hambatan):
- a. Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah: Masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mematuhi Perda/Perkada, seperti masalah PKL yang tidak tertib, pelanggaran tata ruang, atau pelanggaran terkait K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan);

- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Jumlah personil Satpol PP Damkar yang belum sebanding dengan standar pelayanan minimal/ luas wilayah dan jumlah penduduk Purworejo menjadi hambatan. Keterbatasan ini mempengaruhi waktu respons dan cakupan wilayah layanan.
  - c. Tantangan Geografis: Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo yang bervariasi, dari perkotaan hingga perbukitan dan daerah pesisir, menimbulkan tantangan tersendiri. Akses jalan yang sulit dijangkau untuk armada besar, terutama di wilayah pelosok, dapat menghambat kecepatan penanganan kebakaran atau gangguan trantibum;
  - d. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana: Anggaran yang terbatas dapat menghambat pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan personil. Untuk Damkar, ketersediaan armada maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Purworejo (misalnya, jalan sempit) menjadi hambatan besar dalam respons cepat. Begitu juga untuk penyelenggaraan trantibumlinmas, belum optimalnya pemberdayaan Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan anggaran yang belum mencukupi.
  - e. Rasionalisasi Anggaran: Penurunan anggaran pada APBD Perubahan menuntut efisiensi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Alternatif Solusi
- a. Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas secara berkala bagi anggota Satpol PP dan pelatihan teknis penanganan pemadaman kebakaran dan non kebakaran bagi anggota Damkar, baik melalui metode pembelajaran mandiri secara daring (*online learning*) maupun kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka;

- b. Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi terhadap Masyarakat secara partisipatif melalui berbagai platform media dan pertemuan tatap muka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkannya angka kejadian pelanggaran/kebakaran;
- c. Pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat baik Satlinmas maupun Redkar dan mendorong masyarakat untuk menjadi garda terdepan di tingkat desa/kecamatan dalam deteksi dini, pencegahan, dan penanganan awal;
- d. Memperkuat MoU atau kerja sama lintas wilayah dengan kabupaten tetangga untuk dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Optimalisasi Perencanaan dan Strategi Pengelolaan Anggaran;
- f. Mengoptimalkan pemeliharaan rutin dan perawatan berkala untuk memastikan kesiapsiagaan peralatan operasional serta memperpanjang masa pakai sarana prasarana penunjang kegiatan.
- g. Mengoptimalkan kanal pengaduan *online* untuk merespons masukan masyarakat secara cepat guna menjaga stabilitas nilai IKM di setiap semester.

#### **3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran)**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo telah melakukan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Perangkat daerah tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berhasil melakukan efisiensi total sebesar 4,52%

atau senilai Rp560.003.444,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp12.389.177.238,00, realisasi belanja tercatat sebesar Rp11.829.173.794,00 (95,48%).

Pada sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" didukung oleh 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tingkat efisiensi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 3,59% atau sebesar Rp Rp307.598.173,00 dari anggaran sebesar Rp8.564.252.681,00 digunakan sebesar Rp8.256.654.508,00 (96,41%). Efisiensi dicapai melalui optimalisasi belanja rutin kantor dan penyesuaian aktivitas pendukung tanpa mengurangi kualitas *output* administrasi dan layanan internal.

Kemudian sasaran strategis "Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)" tersebut didukung oleh 2 (dua) Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Tingkat efisiensi pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 4,90% atau sebesar Rp138.407.197,00 dari anggaran sebesar Rp2.822.647.597,00 digunakan sebesar Rp2.684.240.400,00 (95,10%). Tingkat efisiensi pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar 11,37% atau sebesar Rp113.998.074,00 dari anggaran sebesar Rp1.002.276.960,00 digunakan sebesar Rp888.278.886,00 (88,63%).

Efisiensi tertinggi terdapat pada Program Kebakaran dan Penyelamatan (11,37%). Capaian efisiensi yang signifikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, antara lain:

1. Menurunnya Intensitas Kejadian Kebakaran: Pada tahun 2025, tercatat penurunan frekuensi kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Purworejo. Penurunan ini berdampak langsung pada penghematan biaya operasional lapangan, seperti penggunaan bahan bakar armada, konsumsi logistik personel saat pemadaman, serta pemakaian bahan pemadam (busa/foam);
2. Rendahnya angka kejadian kebakaran merupakan indikator keberhasilan dari program sosialisasi dan edukasi pencegahan dini kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan meningkatnya kewaspadaan publik, dan cegah dini kebakaran;

Secara keseluruhan berdasarkan analisis capaian realisasi keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berhasil mencapai efisiensi total sebesar 4,52% (Rp560.003.444,00). Efisiensi ini bukan merupakan tanda penurunan kinerja, melainkan hasil dari pengelolaan anggaran yang dilaksanakan secara maksimal. Adapun faktor-faktor utama yang melatarbelakangi efisiensi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap Kebijakan Strategis Nasional dalam mendukung program prioritas nasional sesuai dengan arahan Peraturan Presiden, sehingga Perangkat Daerah melakukan realokasi anggaran/penyesuaian belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Adanya pengangkatan tenaga Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyebabkan perubahan struktur belanja pegawai. Efisiensi terjadi pada sisa anggaran honorarium tenaga kontrak yang sebelumnya dialokasikan dalam pos belanja barang dan jasa;
3. Tidak terserapnya sebagian anggaran pada komponen Belanja Perjalanan Dinas disebabkan oleh pemberlakuan aturan perjalanan dinas dengan prinsip *at cost*;
4. Terdapat sisa anggaran yang berasal dari sisa honorarium narasumber, sisa kontrak pengadaan barang/jasa, serta penghematan

pada aktivitas operasional lainnya yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan atau harga;

5. Menurunnya intensitas kejadian kebakaran pada tahun 2025 sehingga mengurangi biaya operasional pemadaman, seperti penggunaan bahan bakar armada, konsumsi logistik personil saat pemadaman, serta pemakaian bahan pemadam (*busa/foam*).

Selanjutnya analisis capaian kinerja pada Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun efektivitas kinerja tahun 2025 berada pada kategori "Sangat Tinggi", namun secara kuantitas, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan besar terkait pemenuhan rasio minimal personil. Analisis kesenjangan SDM berdasarkan regulasi adalah sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan aparatur Polisi Pamong Praja, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Purworejo yang bertipe B seharusnya memiliki jumlah anggota minimal antara 251 hingga 350 orang. Kondisi saat ini menunjukkan jumlah personil masih jauh dari rasio standar tersebut, sehingga beban kerja per anggota menjadi sangat tinggi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo;
2. Analisis kebutuhan aparatur Pemadam Kebakaran dimana sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Kebakaran, standar ideal operasional adalah 6 (enam) petugas untuk setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran. Kondisi saat ini, setiap hanya regu beranggotakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) personil untuk pos Damkar Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Purwodadi, sedangkan untuk personil pada pos Damkar Mako Induk beranggotakan 5 (lima) orang.

Data di atas menunjukkan bahwa Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mengalami kekurangan personil jika dibandingkan dengan standar pelayanan minimal yang diamanatkan regulasi. Efisiensi yang

dicapai saat ini merupakan hasil dari optimalisasi personil yang ada. Keterbatasan ini memaksa personil bekerja dengan beban ganda di lapangan, yang secara teknis berisiko terhadap optimalisasi prosedur pemadaman dan keselamatan petugas itu sendiri. Oleh karena itu, penambahan jumlah personil melalui formasi PPPK atau ASN di tahun-tahun mendatang merupakan kebutuhan mendesak untuk mencapai ideal dalam pelayanan sesuai standar.

Seluruh efisiensi ini berhasil dicapai Satpol PP Damkar tanpa mengurangi standar kualitas pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan tetap terpenuhinya target *response time* sesuai standar (15 menit) dan tetap terjaganya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kategori "Sangat Baik" serta tercapainya Indeks Pelayanan Dasar SPM sebesar 100%. Efisiensi ini bukan merupakan tanda pengurangan layanan, melainkan hasil dari keberhasilan instansi dalam melakukan penghematan biaya operasional melalui perencanaan yang maksimal dan optimalisasi sumber daya manusia serta penggunaan sarana prasarana yang ada.

Meskipun berbagai kendala operasional dan keterbatasan anggaran pada tahun 2025 dapat diatasi dengan strategi efisiensi serta inovasi lapangan yang optimal, namun untuk menjamin keberlanjutan mutu pelayanan publik yang prima di masa mendatang, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo tetap memerlukan dukungan strategis yang berkesinambungan dimana aspek-aspek yang memerlukan perhatian dan dukungan prioritas diantaranya adalah:

1. Dukungan personil: Perlunya pemenuhan jumlah dan peningkatan kapasitas personil secara berkelanjutan agar selaras dengan beban kerja dan luas cakupan wilayah pelayanan di Kabupaten Purworejo;
2. Dukungan Sarana dan Prasarana: Pemenuhan Sarpras yang sesuai standar teknis, untuk meminimalkan risiko kerja dan memaksimalkan keamanan dalam penyelamatan serta pelayanan terhadap Trantibumlinmas terhadap publik;

3. Dukungan Anggaran: Alokasi anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemeliharaan aset-aset vital organisasi.

Dengan dukungan pada ketiga aspek tersebut, diharapkan stabilitas kinerja yang telah dicapai pada kategori "Sangat Tinggi" dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk memberikan rasa aman dan tertib bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo.

### **3.1.6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam memberikan pelayanan publik. Berikut adalah rincian Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator program tersebut adalah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan capaian 100% dari target 100%. Kegiatan pada program tersebut adalah:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan tersebut adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai 6 Dokumen dari target 6 Dokumen, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tercapai 15 Dokumen dari target 15 Dokumen;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Indikator: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tercapai 16 Laporan dari target 16 Laporan;

6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai 6 Laporan dari target 6 Laporan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan tersebut adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tercapai 100% dari target 100% dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 68 Orang dari target 68 Orang;

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tercapai 6 Laporan dari target 6 Laporan;

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD tercapai 26 Laporan dari target 26 Laporan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan tersebut adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tercapai 100% dari target 100% dengan sub kegiatan:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tercapai 0 orang dari target 0 orang. Hal tersebut dikarenakan Pada tahun anggaran 2025, Sub Kegiatan tersebut semula telah direncanakan dan dialokasikan anggarannya dalam DPA. Namun, sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi belanja guna mendukung prioritas pembangunan nasional, maka dilakukan penyesuaian alokasi sehingga anggaran pada sub kegiatan tersebut diputuskan menjadi nihil (Rp0).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan tersebut adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tercapai 100% dari target 100% dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tercapai 3 Paket dari target 3 Paket;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercapai 4 Paket dari target 4 Paket;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Indikator: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan tercapai 3 Paket dari target 3 Paket;
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tercapai 11 Paket dari target 11 Paket;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tercapai 4 Paket dari target 4 Paket;
- 6) Penyediaan Bahan/Material  
Indikator: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan tercapai 4 paket dari target 4 Paket;
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Indikator: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu tercapai 12 Laporan dari target 12 Laporan;
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tercapai 12 Laporan dari target 12 Laporan;
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan tersebut adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai 2 Laporan dari target 2 Laporan dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapai 12 Laporan dari target 12 Laporan;

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tercapai 12 Laporan dari target 12 Laporan;

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan tersebut adalah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara tercapai 4 Jenis dari target 4 Jenis dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tercapai 1 Unit dari target 1 Unit;

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya tercapai 17 Unit dari target 17 Unit;

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara tercapai 37 Unit dari target 37 Unit;

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tercapai 1 Unit dari target 1 Unit.

## 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Program tersebut adalah Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi tercapai 100% dari target 100%. Kegiatan pada program tersebut adalah:

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota tercapai 12 bulan dari target 12 bulan dengan sub kegiatan:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan

Ketertiban Umum tercapai 0 Dokumen dari Target 0 Dokumen. Hal tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2025, Sub Kegiatan tersebut semula telah direncanakan dan dialokasikan anggarannya dalam DPA. Namun, sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi belanja guna mendukung prioritas pembangunan nasional, maka dilakukan penyesuaian alokasi sehingga anggaran pada sub kegiatan tersebut diputuskan menjadi nihil (Rp0).

- 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;  
Indikator: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya tercapai 96 Orang dari target 96 Orang;
- 4) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan  
Indikator: Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan tercapai 12 Laporan dari target 12 Laporan;
- 5) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada  
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani, iumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani tercapai 2 Laporan dari target 2 Laporan.

- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota dengan sub kegiatan:
- 1) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercapai 12 Laporan dari target 12 Laporan;
  - 2) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)  
Indikator: Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah tercapai 1 Unit dari target 1 Unit;
  - 3) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah  
Indikator: Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan taercapai 3 Laporan dari target 3 Laporan;
  - 4) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercapai 4 Laporan dari target 4 Laporan;
  - 5) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota  
Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP tercapai 12 Laporan dari target 12 Laporan;
  - 6) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota  
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota tercapai 12 Laporan dari target 12 Laporan.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota

Indikator kegiatan tersebut adalah Peningkatan Kinerja Sekretariat PPNS tercapai 100% dari target 100% dengan sub kegiatan:

1) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah tercapai 0 Dokumen dari target 0 Dokumen. Hal tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2025, Sub Kegiatan tersebut semula telah direncanakan dan dialokasikan anggarannya dalam DPA. Namun, sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi belanja guna mendukung prioritas pembangunan nasional, maka dilakukan penyesuaian alokasi sehingga anggaran pada sub kegiatan tersebut diputuskan menjadi nihil (Rp0).

2) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS tercapai 12 Laporan dari target 12 Laporan;

3) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda tercapai 1 Laporan dari target 1 Laporan.

**3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Indikator Program tersebut adalah Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

dan Non Kebakaran tercapai 100% dari target 100%. Kegiatan dari program tersebut adalah:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kegiatan tersebut adalah Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten tercapai 100% dari target 100% dengan sub kegiatan:

1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota tercapai 12 Laporan dengan target 12 Laporan;

2) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

3) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

4) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Indikator: Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan

dan Penanggulangan Kebakaran tercapai 45 Orang dari target 45 Orang;

5) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Indikator: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait tercapai 12 Unit dari target 12 Unit;

7) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen.

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Indikator kegiatan tersebut adalah Peralatan Proteksi Kebakaran yang sesuai standar tercapai 100% dari target 100% dengan sub kegiatan:

1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Indikator: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen;

c. Investigasi Kejadian Kebakaran

Indikator kegiatan tersebut adalah Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran tercapai 100% dari target 100% dengan sub kegiatan:

1) Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Indikator: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen.

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Indikator kegiatan tersebut adalah Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan sub kegiatan:

1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Indikator Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya tercapai 290 Orang dari target 290 Orang;

2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran

Indikator: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya tercapai 400 Desa/Kelurahan dari target 400 Desa/Kelurahan;

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, seluruh program yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo menunjukkan hasil yang baik.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh kegiatan di bawah program ini berhasil mencapai

target kinerja sebesar 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100%. Berdasarkan interval nilai realisasi kinerja, program ini mendapatkan predikat "Sangat Tinggi". Keberhasilan ini didukung oleh ketepatan waktu dalam pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan kepegawaian, serta efektivitas manajemen aset yang mendukung kelancaran seluruh unit kerja.

Selanjutnya Program Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) Keberhasilan pada sasaran strategis pelayanan dasar didukung oleh dua program utama yang juga mencapai realisasi kinerja 100% sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100% dengan kriteria penilaian "Sangat Tinggi". Pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tercapai target 100% pada program ini menunjukkan bahwa seluruh agenda Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, dan Pengamanan; Pengawasan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada; dan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah terlaksana secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Purworejo tanpa adanya kendala operasional yang berarti. Kemudian pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan personil, program ini sukses mencapai target 100%. Keberhasilan ini ditandai dengan pemenuhan *response time* dan layanan penyelamatan yang sigap, serta penurunan angka kejadian kebakaran akibat efektifnya kegiatan pencegahan dan edukasi masyarakat.

Secara keseluruhan predikat "Sangat Tinggi" pada ketiga program di atas didorong oleh faktor-faktor Konsistensi Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan serta Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana maupun Anggaran dalam melaksanakan pelayanan publik.

### 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Besaran anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Purworejo yang dialokasikan untuk anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai pencapaian target kinerja sebesar Rp12.389.177.238,00, dari total pagu tersebut realisasi belanja tercatat sebesar Rp11.829.276.668,00 atau 95,48%. Sebagai bentuk komitmen terhadap penggunaan sumber daya yang efisien dalam rangka mencapai target indikator program, kegiatan, dan sub-kegiatan, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp560.003.444,00 atau 4,52%. Secara rinci untuk Realisasi Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Realisasi Anggaran Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp12.389.177.238,00	Rp11.829.276.668,00	95,48%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp8.564.252.681,00	Rp8.256.654.508,00	96,41%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp24.554.700,00	Rp24.319.200,00	99,04%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp18.039.100,00	Rp17.824.800,00	98,81%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp594.100,00	Rp591.500,00	99,56%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp340.000,00	Rp340.000,00	100,00%

No.	Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp324.000,00	Rp324.000,00	100,00%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp2.999.100,00	Rp2.988.800,00	99,66%
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.258.400,00	Rp2.250.100,00	99,63%
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp7.982.147.981,00</b>	<b>Rp7.713.285.406,00</b>	<b>96,63%</b>
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp7.977.506.881,00	Rp7.708.725.156,00	96,63%
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp929.400,00	Rp923.700,00	99,39%
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp3.711.700,00	Rp3.636.550,00	97,98%
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp4.841.200,00</b>	<b>Rp4.810.600,00</b>	<b>99,37%</b>
10.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp1.279.900,00	Rp1.268.300,00	99,09%
11.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp3.561.300,00	Rp3.542.300,00	99,47%
12.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp181.061.250,00</b>	<b>Rp169.508.350,00</b>	<b>93,62%</b>
13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp7.340.100,00	Rp5.650.385,00	76,98%
14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp11.329.200,00	Rp7.431.200,00	65,59%
15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp8.313.300,00	Rp7.148.410,00	85,99%
16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp107.170.950,00	Rp103.635.000,00	96,70%
17.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp8.575.200,00	Rp8.575.200,00	100,00%
18.	Penyediaan Bahan/Material	Rp7.363.500,00	Rp7.361.215,00	99,97%

No.	Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
19.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp2.226.000,00	Rp1.250.000,00	56,15%
20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp25.373.400,00	Rp25.247.700,00	99,50%
21.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp3.369.600,00	Rp3.209.240,00	95,24%
5.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp85.808.550,00</b>	<b>Rp70.381.782,00</b>	<b>82,02%</b>
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp68.681.550,00	Rp56.328.672,00	82,01%
23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp17.127.000,00	Rp14.053.110,00	82,05%
6.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp285.839.000,00</b>	<b>Rp274.349.170,00</b>	<b>95,98%</b>
24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp38.220.000,00	Rp38.058.649,00	99,58%
25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp181.260.000,00	Rp172.521.721,00	95,18%
26.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp17.400.000,00	Rp17.217.000,00	98,95%
27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp48.959.000,00	Rp46.551.800,00	95,08%
II.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rp2.822.647.597,00</b>	<b>Rp2.684.343.274,00</b>	<b>95,10%</b>
7.	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp761.153.800,00</b>	<b>Rp710.224.520,00</b>	<b>93,31%</b>

No.	Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
28.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp474.120.400,00	Rp438.001.773,00	92,38%
29.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
30.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp27.402.000,00	Rp27.402.000,00	100,00%
31.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp6.600.700,00	Rp6.358.000,00	96,32%
32.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp250.723.700,00	Rp238.462.747,00	95,11%
33.	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Rp2.307.000,00	Rp0,00	0,00%
8.	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Rp2.018.460.797,00</b>	<b>Rp1.932.284.154,00</b>	<b>95,73%</b>
34.	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp23.160.400,00	Rp22.643.600,00	97,77%
35.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Rp525.000.000,00	Rp511.670.963,00	97,46%

No.	Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
36.	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp11.863.000,00	Rp4.056.800,00	34,20%
37.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp111.447.300,00	Rp91.022.300,00	81,67%
38.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Rp1.063.132.397,00	Rp1.027.998.591,00	96,70%
39.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp283.857.700,00	Rp274.891.900,00	96,84%
9.	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp43.033.000,00</b>	<b>Rp41.834.600,00</b>	<b>97,22%</b>
40.	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
41.	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Rp36.693.300,00	Rp35.544.600,00	96,87%
42.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp6.339.700,00	Rp6.290.000,00	99,22%
III.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Rp1.002.276.960,00</b>	<b>Rp888.278.886,00</b>	<b>88,63%</b>
10.	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp902.994.360,00</b>	<b>Rp821.700.490,00</b>	<b>91,00%</b>
43.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp336.651.800,00	Rp306.057.573,00	90,91%
44.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp77.438.600,00	Rp64.305.790,00	83,04%

No.	Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
45.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp242.950.000,00	Rp231.616.700,00	95,34%
46.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp27.735.000,00	Rp18.632.000,00	67,18%
47.	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Rp113.964.300,00	Rp108.281.436,00	95,01%
48.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp97.630.660,00	Rp86.302.991,00	88,40%
49.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp6.624.000,00	Rp6.504.000,00	98,19%
11.	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Rp3.962.800,00</b>	<b>Rp212.800,00</b>	<b>5,37%</b>
50.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp3.962.800,00	Rp212.800,00	5,37%
12.	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>Rp5.429.800,00</b>	<b>Rp1.491.596,00</b>	<b>27,47%</b>
51.	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp5.429.800,00	Rp1.491.596,00	27,47%
13.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Rp89.890.000,00</b>	<b>Rp64.874.000,00</b>	<b>72,17%</b>
52.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp78.170.000,00	Rp54.132.000,00	69,25%
53.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp11.720.000,00	Rp10.742.000,00	91,66%
	<b>Jumlah : 53 Sub Kegiatan</b>	<b>12.389.177.238</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48%</b>

Sebanyak 3 program dan 13 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian realisasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai realisasi sebesar 96,41% (Rp8.256.654.508,00 dari pagu Rp8.564.252.681,00). Efisiensi sebesar 3,59% ini tersebar pada beberapa kegiatan dengan rincian analisis sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran 99,04%;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran 96,63%;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran 99,37%;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran 93,62%;
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi anggaran 82,02%;
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi anggaran 95,98%.

Meski beberapa kegiatan didalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota masih terdapat beberapa kegiatan yang capaian keuangannya dibawah 95% diantaranya pada:

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah (Realisasi 93,62%)

Adanya realisasi harga satuan belanja yang lebih rendah dibandingkan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan dalam perencanaan. Hal ini terjadi pada sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (76,98%), Perlengkapan Kantor (92,02%), dan Peralatan Rumah Tangga (85,99%). Kemudian pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (realisasi 56,16%), efisiensi terjadi karena realisasi belanja disesuaikan dengan intensitas kunjungan tamu.

2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan (Realisasi 82,02%)

Permasalahannya adalah terjadinya penyesuaian belanja jasa pelayanan umum kantor akibat adanya pengangkatan tenaga Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menyebabkan anggaran jasa pelayanan umum hanya terserap 82,93%. Selanjutnya Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik direalisasikan menyesuaikan dengan rekening tagihan bulanan, hal itu menghasilkan serapan sebesar 82,01% atau efisiensi sebesar 17,19%.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.822.647.597,00 dengan realisasi sebesar Rp2.684.343.274,00 atau 95,10%. Efisiensi sebesar 4,90% ini tersebar pada beberapa kegiatan dengan rincian analisis sebagai berikut:

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 93,31%;
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 95,73%;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 97,22%

Meski beberapa kegiatan didalam Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih terdapat beberapa kegiatan yang capaian keuangannya dibawah 95% yaitu pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dimana beberapa sub kegiatan mengalami efisiensi karena beberapa faktor kebijakan dan kondisi lapangan seperti halnya tidak terserapnya anggaran pada komponen Belanja Perjalanan Dinas disebabkan oleh pemberlakuan aturan perjalanan dinas (*at cost*), Tidak adanya aduan dari warga yang terkena dampak gangguan Trantibum atau kerugian akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/Perkada dan selaian itu, terjadi efisiensi pada belanja jasa tenaga Non ASN seiring dengan adanya pengangkatan tenaga Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.002.276.960,00 dengan realisasi sebesar Rp888.278.886,00 atau 88,63%. Efisiensi sebesar 11,37% ini tersebar pada beberapa kegiatan dengan rincian analisis sebagai berikut:

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran (Realisasi 91,00%);
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (Realisasi 5,37%);
- c. Investigasi Kejadian Kebakaran (Realisasi (27,47%);
- d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (Realisasi 72,17%).

Semua kegiatan didalam Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran capaian keuangannya dibawah 95% hal tersebut dikarenakan:

- 1) Pada kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran (Realisasi 91,00%). Efisiensi pada sektor ini dipengaruhi oleh faktor yaitu menurunnya intensitas kebakaran berdampak pada efisiensi penggunaan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) operasional armada pemadam sehingga realisasinya lebih rendah dari estimasi perencanaan selain itu pemberlakuan aturan perjalanan dinas (*at cost*) pada komponen Belanja Perjalanan Dinas, kemudian terdapat sisa tender/efisiensi kontrak serta harga satuan belanja yang berada di bawah Standar Satuan Harga (SSH), serta Realisasi perbaikan pada mesin pompa portabel tidak dapat dilaksanakan dikarenakan estimasi biaya perbaikan melebihi pagu anggaran yang tersedia, sehingga dengan adanya keterbatasan tersebut, instansi mengambil kebijakan dengan melakukan pemeliharaan rutin kendaraan;
- 2) Pada kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (5,37%) dan Investigasi Kejadian Kebakaran (27,47%) mencatatkan serapan yang rendah. Hal ini disebabkan karena tidak terserapnya anggaran pada komponen Belanja Perjalanan Dinas disebabkan oleh pemberlakuan aturan perjalanan dinas (*at cost*);
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (Realisasi 72,17%) hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (69,25%) atau terjadi efisiensi sebesar 30,75% oleh adanya perubahan jumlah narasumber pada saat pelaksanaan serta sisa anggaran honorarium. Selain itu pada sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran tidak terserapnya anggaran pada komponen Belanja Perjalanan Dinas disebabkan oleh pemberlakuan aturan perjalanan dinas (*at cost*).

Alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan dalam rangka tindak lanjut atas realisasi anggaran dan efisiensi yang tercapai pada tahun 2025, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terhadap sisa anggaran sebesar tahun 2025 sebesar Rp560.003.444,00, jumlah tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran. Dana tersebut telah dikembalikan ke Kas Umum Daerah sebagai bentuk kepatuhan terhadap akuntabilitas keuangan. Sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, dana SILPA tersebut diproyeksikan untuk digunakan kembali oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berikutnya untuk mendukung keberlanjutan program-program strategis;
2. Sebagai evaluasi atas adanya selisih harga pasar dengan Standar Satuan Harga (SSH) serta adanya kegiatan yang diputuskan menjadi nihil (Rp0), maka untuk periode mendatang, proses penyusunan RKA akan dilakukan secara lebih dicermati dengan melakukan survei harga pasar terkini untuk meminimalisir selisih harga terhadap SSH. Perencanaan kegiatan akan lebih disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta penerapan prinsip efisiensi pada belanja jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik akan terus dipertahankan dengan melakukan pembayaran sesuai tagihan.

### **3.3. Inovasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa inovasi didefinisikan sebagai semua bentuk

pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk inovasi, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi merupakan upaya mencari solusi atas permasalahan, kendala dan tantangan yang ada serta optimalisasi potensi sumber daya yang ada untuk lebih efektif dan efisien. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 telah melaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut:

#### 1. GAS PEDAS

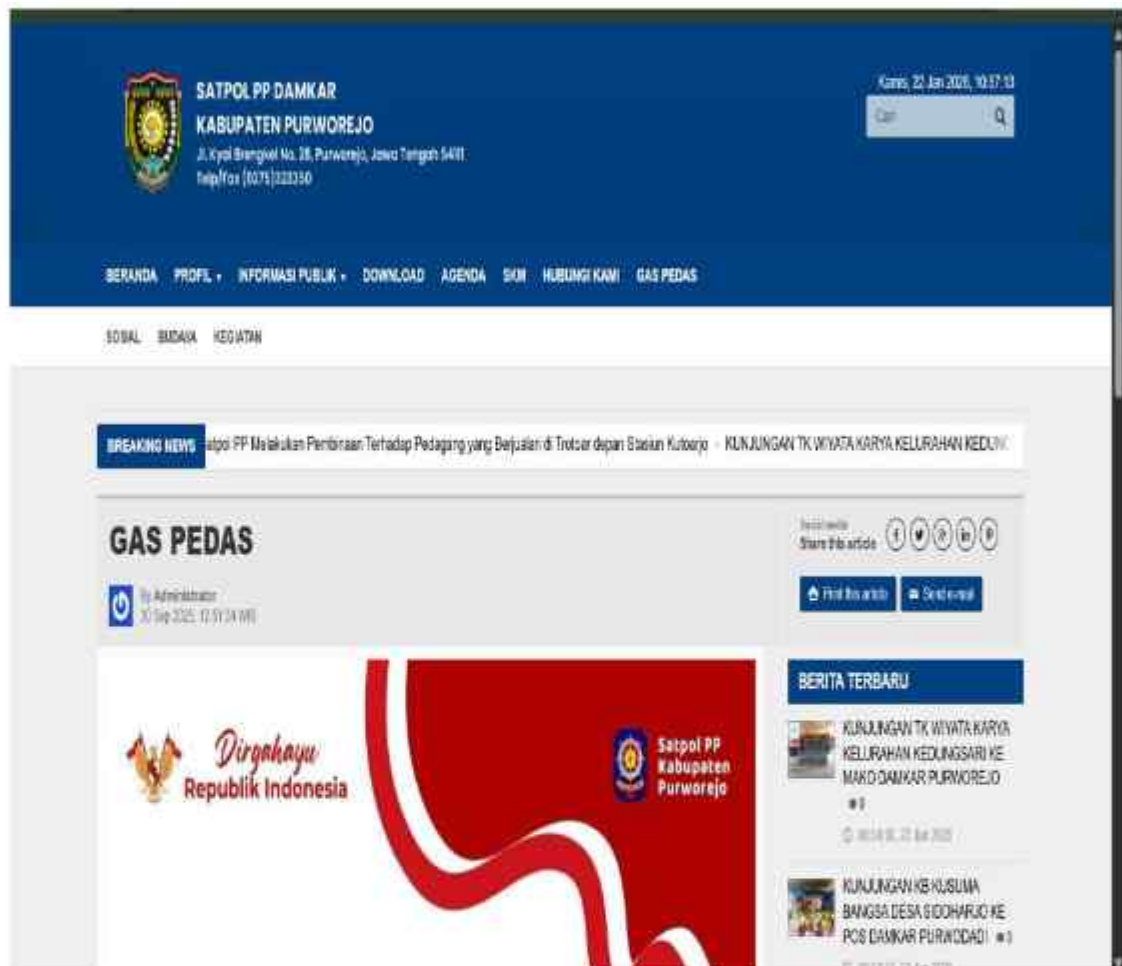
Inovasi GAS PEDAS (Gerakan Aksi Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja) merupakan inovasi berupa gerakan penegakan peraturan secara preventif yang dibangun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dengan dilatarbelakangi masih adanya permasalahan penegakan peraturan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Purworejo.

Hal ini sangat terkait juga dengan isu global yang berkembang saat ini yaitu Asta Cita ke-4, yaitu mewujudkan penegakan hukum yang bermartabat dan terpercaya, karena peningkatan pemahaman hukum Masyarakat merupakan bagian penting dari reformasi sistem hukum nasional. Secara nasional hal ini juga cukup menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Sebelum adanya inovasi ini kondisinya adalah penegakan peraturan terkendala dengan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku, terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, baik dari segi frekuensi maupun jangkauan wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan peraturan, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Namun setelah dibangunnya inovasi ini kondisinya menjadi semakin baik, dengan adanya inovasi GAS PEDAS (Gerakan Aksi Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo menerapkan metode pembaharuan dengan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan berbasis digital.

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui Website resmi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo <https://satpolppdamkar.purworejokab.go.id/> kemudian menuju menu bar GAS PEDAS atau juga dapat diakses melalui Instagram @satpolpp\_purworejo.

Gambar 3.1  
Tampilan Inovasi GAS PEDAS



## 2. SIAPNO DAMKAR

Inovasi SIAPNO DAMKAR merupakan inovasi percepatan sistem laporan dan pengaduan non kebakaran yang menggunakan *g-form* yang dikoneksikan dengan *ai autocreat* yang langsung otomatis menerima aduan kebutuhan pelayanan penyelamatan non kebakaran dari masyarakat dalam bentuk surat permohonan yang dikirimkan ke email Bidang Damkar Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui link: <https://sites.google.com/view/siapnodamkar>

Gambar 3.2  
Tampilan Inovasi SIAPNO DAMKAR




Gambar 3.3  
Tampilan Ringkasan Aduan Inovasi SIAPNO DAMKAR

Tanggal	Jenis Pelaporan	Isi Laporan	Nama Pelapor	Alamat	Peristiwa dan Lokasi Insiden	Nama WA (yang sudah dihubungi)	Tanggal menerima permohonan (sudah 1 Desember 2024)	File Laporan	File KTP
11/4/2024 9:02:18	Evaluasi Ular	ular yang masuk ke dalam area rumah dan membahayakan penghuni rumah	Sheila Rahmanda	Cangsep Lor RT 3 RW 1 Kriyan, Kec. Purworejo	Musibah Al Taubah ke barat, Posko Pusat Rehabilitasi Yakuam, Rumah keramik hijau	08138730021	4 November 2024	<a href="https://drive.google.com/asset?id=1LpR-DuyZLLAHQES2okdS-ZNtWw">https://drive.google.com/asset?id=1LpR-DuyZLLAHQES2okdS-ZNtWw</a>	<a href="https://drive.google.com/asset?id=13bb3LurGUUGSSK6gF0PM0Gm6Ta">https://drive.google.com/asset?id=13bb3LurGUUGSSK6gF0PM0Gm6Ta</a>
11/5/2024 9:55:53	Evaluasi Cincin	kejadian cincin yang tidak bisa terlepas dari jari	Ara Ananda Regita	Sedugan	Bekang Tiko Sarboga	085867847403	5 November 2024	<a href="https://drive.google.com/asset?id=1eeSMXezmUChm8E2DMFmesd0zPy">https://drive.google.com/asset?id=1eeSMXezmUChm8E2DMFmesd0zPy</a>	<a href="https://drive.google.com/asset?id=1DnD03H2LkzJGUA746wK9Yd1m6Gd">https://drive.google.com/asset?id=1DnD03H2LkzJGUA746wK9Yd1m6Gd</a>
11/5/2024 13:42:21	Evaluasi Sarung Tawon	sarang tawon jenis vespa affinis (Tawon Ndas)	Fuad Ramadhan	Kedai kopi lokal	Peragaan endungan re lele, gas di peragaan kedai kopi lokal	081228032855	5 november 2024	<a href="https://drive.google.com/asset?id=13W7AsnG2jpsmD0y1dF_3EY2_hd">https://drive.google.com/asset?id=13W7AsnG2jpsmD0y1dF_3EY2_hd</a>	<a href="https://drive.google.com/asset?id=1UUVJwP02x0bawWYQRM0Vlg2YnT4">https://drive.google.com/asset?id=1UUVJwP02x0bawWYQRM0Vlg2YnT4</a>
11/5/2024 14:00:02	Evaluasi Ular	ular yang masuk ke dalam area rumah dan membahayakan penghuni rumah	Pulang Adhi Prabowo	Desa Grabag, Purworejo	100 meter timur pasar grabag (bako kemasam jaha)	081249801197	6 november 2024	<a href="https://drive.google.com/asset?id=1ehTGLDdPL4L4HYYwR8SMj0b0k0">https://drive.google.com/asset?id=1ehTGLDdPL4L4HYYwR8SMj0b0k0</a>	<a href="https://drive.google.com/asset?id=1BNFy6eQakR0e430mU50wvK9M">https://drive.google.com/asset?id=1BNFy6eQakR0e430mU50wvK9M</a>

### 3.4. Penghargaan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo telah meraih penghargaan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.11  
Penghargaan Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025

No.	Nama Piagam/ Penghargaan	Pemberi Piagam/ Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
1	2	3	4	5
1.	Juara I Perangkat Daerah dengan Evaluasi Kinerja Terbaik Tahun 2025 Kategori Sekretariat/ Badan/ Dinas	Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo	Evaluasi Kinerja Terbaik Tahun 2025 Kategori Sekretariat/ Badan/ Dinas	

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang diamanatkan kepada setiap perangkat daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo sebagai salah satu perangkat daerah wajib menyajikan laporan kinerja berdasarkan prinsip akuntabilitas yang jelas, transparan dan terukur. Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban LKjIP berfungsi sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja, serta pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, secara umum telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dalam merealisasikan sasaran strategis selaras dengan target RPJMD 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi, Capaian Kinerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo sebesar 100% atau masuk kategori Sangat Tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
2. Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pada aspek keuangan dengan capaian anggaran sebesar 95,48% dan capaian kinerja 100%, maka pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dapat dikategorikan berhasil. Seluruh target kegiatan tahun 2025 telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut tanpa hambatan yang berarti sehingga dapat dikatakan tidak ada kegagalan, sedangkan hal-hal yang sifatnya penyempurnaan dapat dilakukan sesuai tahapan beserta solusinya. Terhadap efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp560.003.444,00 (4,52%), sisa tersebut menjadi SILPA yang

dikembalikan ke Kas Umum Daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah selanjutnya.

Meskipun capaian target terpenuhi, terdapat beberapa catatan kendala atau permasalahan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Jumlah personil Satpol PP Damkar yang belum sebanding dengan standar pelayanan minimal/ luas wilayah dan jumlah penduduk Purworejo menjadi hambatan. Keterbatasan ini mempengaruhi waktu respons dan cakupan wilayah layanan;
- 2) Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana: Anggaran yang terbatas dapat menghambat pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan personil. Untuk Damkar, ketersediaan armada maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Purworejo (misalnya, jalan sempit) menjadi hambatan besar dalam respons cepat. Begitu juga untuk penyelenggaraan trantibumlinmas, belum optimalnya pemberdayaan Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan anggaran yang belum mencukupi.
- 3) Rasionalisasi Anggaran: Penurunan anggaran pada APBD Perubahan menuntut efisiensi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Faktor Eksternal

- 1) Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah: Masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mematuhi Perda/Perkada, seperti masalah PKL yang tidak tertib, pelanggaran tata ruang, atau pelanggaran terkait K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan);

- 2) Tantangan Geografis: Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo yang bervariasi, dari perkotaan hingga perbukitan dan daerah pesisir, menimbulkan tantangan tersendiri. Akses jalan yang sulit dijangkau untuk armada besar, terutama di wilayah pelosok, dapat menghambat kecepatan penanganan kebakaran atau gangguan trantibum;

#### 4.2. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja pada masa mendatang, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo menyusun rencana tindak lanjut terhadap capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM atau pelatihan berkelanjutan dan mengusulkan kebutuhan personel melalui mekanisme pengadaan ASN guna memenuhi rasio standar minimal;
- b. Mengintensifkan pembinaan internal oleh Pimpinan dan bagian kepegawaian untuk memastikan seluruh anggota Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dapat mematuhi aturan kerja yang berlaku dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab;
- c. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait guna harmonisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lapangan;
- d. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana secara bertahap melalui pengusulan anggaran yang sistematis pada Sub Urusan Trantibum dan Kebakaran setiap tahunnya untuk memaksimalkan pelayanan yang menunjang capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo pada Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran;
- e. Mengintensifkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya kesadaran hukum serta kepedulian terhadap trantibumlinmas;
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat serta pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran (REDKAR) sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat lingkungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan pelayanan prima.

Purworejo, 20 Februari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Purworejo,



Siswanto Dwi Nugroho, S.STP., M.M.  
Pembina Tingkat I/IV/b  
NIP.198206162001121003

## LAMPIRAN

1. Daftar Referensi
2. SK Tim Penyusun LKjIP 2025
3. SK Penetapan LKjIP 2024
4. PK Perangkat Daerah Murni dan Perubahan Tahun 2025
5. Laporan Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah
6. SK IKU Perangkat Daerah
7. Hasil SKM Tahun 2025
8. Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
9. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima Perangkat Daerah

## DAFTAR REFERENSI

- Jakarta. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Kementerian Dalam Negeri: Jakarta.
- Jakarta. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri: Jakarta.
- Jakarta. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota*. Kementerian Dalam Negeri: Jakarta.
- Jakarta. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Kementerian Dalam Negeri: Jakarta.
- Kabupaten Purworejo. 2014. *Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo*. Pemerintah Kabupaten Purworejo: Purworejo.
- Kabupaten Purworejo. 2021. *Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan*

*Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo: Purworejo.*

Kabupaten Purworejo. 2021 *Peraturan Bupati Purworejo Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.* Pemerintah Kabupaten Purworejo: Purworejo.

Kabupaten Purworejo. 2022. *Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.* Pemerintah Kabupaten Purworejo: Purworejo.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Kyai Brengkel No. 28 Purworejo Kode Pos 54118  
Telp/Fax. (0275) 323350 – 219 /113 Fax. (0275) 323350

Laman: satpolppdamkar.purworejokab.go.id; Pos-el: satpolpp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 000.8.6.3 / 003 / 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2025 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
  - b. bahwa guna mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 seri D Nomor 1) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5/2025);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 135 Seri D Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 23 Seri A Nomor 3).

Memutuskan...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Melaksanakan perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026;
  - b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO,



*Siswanto*  
SISWANTORO DWI NUGROHO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASATPOL PP  
 DAMKAR KAB PURWOREJO  
 NOMOR : 000-8-63/003/2026  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH TAHUN 2025 SATUAN  
 POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
 KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Ketua
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Seksi penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
11.	Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sarpras pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sarpras pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Investigasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Investigasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarpras Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarpras Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
14.	Dian Perwita Handayani NIP. 198411082010012022	Bendahara pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
15.	Gigih Priyambodo NIP. 196911171993031003	Pengadministrasi Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
16.	Gigih Perdana Kusuma A.Md NIP. 199709092020121003	Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
17.	Rifky Angga Noersakti, A.Md. NIP. 199305252020121004	Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Bayu Agung Nugroho, A.Md NIP. 199602152020121000	Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
19.	Miftah Rahmat Nur Sidik, S.Tr.I.P NIP. 200107152024091001	Analisis Kebakaran Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
20.	Devi Rissa Ristiana NIP. 199206022025212038	Operator Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
21.	Ayu Fajar Septiana NIP. 199909142025212007	Operator Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO,



SISWANTORO DWI NUGROHO



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Kyai Brengkel No. 28 Purworejo Kode Pos 54118  
Telp/Fax. (0275) 323350 – 219 /113 Fax. (0275) 323350

Laman: satpolppdamkar.purworejokab.go.id; Pos-el: satpolpp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 900.1/005/2026

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
  - b. bahwa Laporan Kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah;
  - c. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 seri D Nomor 1) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5/2025);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 135 Seri D Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 23 Seri A Nomor 3);

Memutuskan...

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya;
- KETIGA** : Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II: PERENCANAAN KINERJA  
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA  
BAB IV: PENUTUP  
LAMPIRAN
- KEEMPAT** : Naskah Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo menyiapkan indikator kinerja yang memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu;
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo;

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 26 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO,



*Siswanto*  
SISWANTORO DWI NUGROHO



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Kyai Brengkel Nomor 28 Purworejo, Jawa Tengah 54111  
Telepon (0275) 323350 – 324219 (133), Faksimile (0275) 323350  
Laman satpolppdamkar.purworejokab.go.id Pos-el satpolppdamkar@purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI WIBOWO, S.Sos., M. Si.

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Purworejo

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : YULI HASTUTI

Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,33
2	Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100,00%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.8.878.474.936,00	APBD
2	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp.3.457.106.800,00	APBD
3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.1.357.961.500,00	APBD

Purworejo, 3 Januari 2025

  
 Bupati Purworejo,  
  
**YULI HASTUTI**

  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan  
 Pemadam Kebakaran  
 Kabupaten Purworejo,  
  
**BUDI WIBOWO, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19720425 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Kyai Brengkel Nomor 28 Purworejo, Jawa Tengah 54111  
Telepon (0275) 323350 – 324219 (133), Faksimile (0275) 323350  
Laman satpolppdamkar.purworejokab.go.id Pos-el satpolppdamkar@purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI WIBOWO, S.Sos., M. Si.

Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Purworejo

selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : YULI HASTUTI

Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 20 Oktober 2025



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,33
2	Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.564.252.681,00	APBD
2 Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.822.647.597,00	APBD
3 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.002.276.960,00	APBD

Purworejo, 20 Oktober 2025





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Kyai Brengkel Nomor 28 Purworejo, Jawa Tengah 54111  
Telepon (0275) 323350 – 324219 (133), Faksimile (0275) 323350  
Laman satpolppdamkar.purworejokab.go.id Pos-el satpolppdamkar@purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWANTORO DWI NUGROHO, S.STP, M.M.

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo

selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : YULI HASTUTI

Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 19 Desember 2025



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,33
2	Meningkatnya Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.564.252.681,00	APBD
2 Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.822.647.597,00	APBD
3 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.002.276.960,00	APBD

Purworejo, 19 Desember 2025

**BUPATI PURWOREJO**  
  
**YULI HASTUTI**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO**  
  
**SIWAN TORO DWI NUGROHO, S.STP, M.M.**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19820616 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
Periode : 01 January 2025 s/d 31 December 2025

**Organisasi** : 0-00 0-00 0-03 00 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
**Sub Unit Organisasi** : 0-00 0-00 0-03 00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.389.177.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829.276.668,00</b>	<b>11.829.276.668,00</b>	<b>95,48</b>	<b>(559.900.570,00)</b>	<b>15.428.070.801,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.334.135.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.812.292.814,00</b>	<b>10.812.292.814,00</b>	<b>95,40</b>	<b>(521.842.424,00)</b>	<b>12.731.577.801,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	7.977.506.881,00	0,00	7.708.725.156,00	7.708.725.156,00	96,63	(268.781.725,00)	8.575.914.748,00
5.1.2	Belanja Barang dan jasa	3.356.628.357,00	0,00	3.103.567.658,00	3.103.567.658,00	92,46	(253.060.699,00)	6.155.663.053,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.055.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.983.854,00</b>	<b>1.016.983.854,00</b>	<b>96,39</b>	<b>(38.058.146,00)</b>	<b>2.696.493.000,00</b>
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	530.042.000,00	0,00	505.312.891,00	505.312.891,00	95,33	(24.729.109,00)	2.696.493.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	525.000.000,00	0,00	511.670.963,00	511.670.963,00	97,46	(13.329.037,00)	0,00
<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>		<b>(12.389.177.238,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.829.276.668,00)</b>	<b>(11.829.276.668,00)</b>	<b>95,48</b>	<b>559.900.570,00</b>	<b>(15.428.070.801,00)</b>



Purworejo, 31 Desember 2025

Panglima Anggaran

Siswanigro Dwi Nugroho, S.STP., M.M.  
NIP. 198206162001121003





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Kyai Brengkel No. 28 Purworejo Kode Pos 54118  
Telp/Fax. (0275) 323350 – 219 /113 Fax. (0275) 323350

Laman: satpolppdamkar.purworejokab.go.id; Pos-el: satpolpp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 000-7 / 093 / 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 61).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 16.18/551/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 17 Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 000-7 / 0531 / 2025  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	Indeks	Satpol PP Damkar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terlaksananya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Capaian Program Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran /2 *100	%	Satpol PP Damkar

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO



BUDI WIBOWO

*Keterangan :*

\* Diisi definisi Operasional sesuai Keputusan Bupati Purworejo Nomor 16.18/551/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

**TABEL BENTUK MUTU PELAYANAN**  
**FORMAT PUBLIKASI IKM DI RUANG PELAYANAN**

<b>INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b> <b>SATPOL PP DAMKAR KAB. PURWOREJO</b> <b>TAHUN 2025</b>	
<b>93,10</b>	<p><b>NAMA LAYANAN: TRANTIBUMLINMAS dan DAMKAR</b></p> <p><b>RESPONDEN</b></p> <p>Jumlah : 140 Orang</p> <p>Jenis kelamin, Pendidikan : L = 84 orang, P = 56 orang</p> <p>: SD = 2</p> <p>: SMP = 10</p> <p>: SMA = 58</p> <p>: D3 = 8</p> <p>: S1 = 59</p> <p>: S2 = 3</p> <p>Periode Survei : Januari s.d Juni 2025</p>
<p><b>TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN</b></p> <p><b>MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS</b></p> <p><b>MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN BAGI MASYARAKAT</b></p>	

<b>Klasifikasi Nilai IKM</b>		
D	Tidak Baik	25.00 – 64.99
C	Kurang Baik	65.00 – 76.60
B	Baik	76.61 – 88.30
A	Sangat Baik	88.31 – 100.00

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PURWOREJO**



**BUDI WIBOWO, S.Sos., M.Si.**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP 197204251992031003**

**TABEL BENTUK MUTU PELAYANAN  
FORMAT PUBLIKASI IKM DI RUANG PELAYANAN**

**INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
SATPOL PP DAMKAR KAB. PURWOREJO  
TAHUN 2025**

<b>NILAI IKM</b>	<b>NAMA LAYANAN: TRANTIBUMLINMAS dan DAMKAR</b>
<b>88,33</b>	<b>RESPONDEN</b>  Jumlah : 291 orang  Jenis kelamin : L= 113      P= 178 Pendidikan : SD = 51 SMP = 28 SMA = 112 D3 = 11 S1 = 69 S2 = 20  Periode Survei : Juli s.d Desember 2025

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI  
DAN MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN BAGI MASYARAKAT

Klasifikasi Nilai IKM		
D	Tidak Baik	25.00 – 64.99
C	Kurang Baik	65.00 – 76.60
B	Baik	76.61 – 88.30
A	Sangat Baik	88.31 – 100.00

PIL.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO



**BUDI WIBOWO, S.Sos.,M.Si.**  
Pembina Utama Muda/ IV/c  
NIP 197204251992031003

## LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

S/D BULAN DESEMBER 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.564.252.681				8.564.252.681					13.355.000	8.550.897.681	100,00	7.748.025.966	498.310.842	8.246.336.808	96,29	100,00	0,00	
1	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.554.700				24.554.700					13.355.000	11.199.700	100,00		24.319.200	24.319.200	99,04	100,00	0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.039.100				18.039.100					13.355.000	4.684.100	100,00		17.824.800	17.824.800	98,81	100,00	0,00	
80		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (13.00)	5.872.800				5.872.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	CV. Reitan	27-Feb-2025 s/d 27-Mar-2025	2.300.200	3.572.600	100,00		5.705.800	5.705.800	97,16	100,00	0,00	
81		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (75.00)	11.516.300				11.516.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	Ardin Kitoen	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	11.094.800	461.500	100,00		11.469.000	11.469.000	99,59	100,00	0,00	
82		Penyusunan Manajemen Resiko (MR) (10.00)	450.000				450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		450.000	100,00		450.000	450.000	100,00	100,00	0,00	
83		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.00)	200.000				200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		200.000	100,00		200.000	200.000	100,00	100,00	0,00	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	594.100				594.100							100,00		591.500	591.500	99,56	100,00	0,00	
3		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0	0,00	100,00	0,00	
84		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (10.00)	274.100				274.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		274.100	100,00		271.500	271.500	99,05	100,00	0,00	
85		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (85.00)	320.000				320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		320.000	100,00		320.000	320.000	100,00	100,00	0,00	
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	340.000				340.000							100,00		340.000	340.000	100,00	100,00	0,00	
		Jumlah	11.349.095.238	1.040.082.000			12.389.177.238					13.355.000	8.550.897.681	100,00	9.422.379.871	2.406.896.797	11.829.276.668	95,48	100,00	0,00	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %			
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD (10.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
2		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
88		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (85.00)	340.000				340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		340.000	100,00		340.000	340.000	100,00	100,00	0,00		
<b>1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>			<b>324.000</b>				<b>324.000</b>						<b>100,00</b>		<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
1		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (10.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
2		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
90		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (85.00)	324.000				324.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		324.000	100,00		324.000	324.000	100,00	100,00	0,00		
<b>1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>			<b>2.999.100</b>				<b>2.999.100</b>						<b>100,00</b>		<b>2.988.800</b>	<b>2.988.800</b>	<b>99,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
91		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (15.00)	1.009.100				1.009.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.009.100	100,00		998.800	998.800	98,98	100,00	0,00		
92		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (80.00)	1.990.000				1.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.990.000	100,00		1.990.000	1.990.000	100,00	100,00	0,00		
93		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (5.00)	400.000				400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		400.000	100,00		400.000	400.000	100,00	100,00	0,00		
<b>1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>2.258.400</b>				<b>2.258.400</b>						<b>100,00</b>		<b>2.250.100</b>	<b>2.250.100</b>	<b>99,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
94		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (15.00)	638.400				638.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		638.400	100,00		630.100	630.100	98,70	100,00	0,00		
<b>Jumlah</b>			<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.375.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %	Deviasi Fisik (%)	
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
95		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (80.00)	1.460.000				1.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.460.000	100,00		1.460.000	1.460.000	100,00	100,00	0,00	
96		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5.00)	180.000				180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		180.000	100,00		180.000	180.000	100,00	100,00	0,00	
2	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.982.147.981				7.982.147.981							100,00	7.708.725.156	4.560.250	7.713.285.406	96,63	100,00	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.977.506.881				7.977.506.881							100,00	7.708.725.156		7.708.725.156	96,63	100,00	0,00	
1		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
2		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
97		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (95.00)	7.977.506.881				7.977.506.881	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		7.977.506.881	100,00	7.708.725.156		7.708.725.156	96,63	100,00	0,00	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	929.400				929.400							100,00		923.700	923.700	99,39	100,00	0,00	
98		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (15.00)	529.400				529.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		529.400	100,00		523.700	523.700	98,92	100,00	0,00	
99		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (80.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
100		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (5.00)	400.000				400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		400.000	100,00		400.000	400.000	100,00	100,00	0,00	
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.711.700				3.711.700							100,00		3.636.550	3.636.550	97,98	100,00	0,00	
101		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (15.00)	1.851.700				1.851.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.851.700	100,00		1.676.550	1.676.550	90,54	100,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.395.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.375.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %			
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	102	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (30.00)	1.060.000				1.060.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.060.000	100,00		1.160.000	1.160.000	106,43	100,00	0,00		
	103	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (5.00)	800.000				800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		800.000	100,00		800.000	800.000	100,00	100,00	0,00		
3	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	4.841.200				4.841.200							100,00		4.810.600	4.810.600	99,37	100,00	0,00		
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	1.279.900				1.279.900							100,00		1.268.300	1.268.300	99,09	100,00	0,00		
	104	Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan (15.00)	999.900				999.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		999.900	100,00		948.300	948.300	96,76	100,00	0,00		
	105	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan (30.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0	0,00	100,00	0,00		
	106	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan (5.00)	320.000				320.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		320.000	100,00		320.000	320.000	100,00	100,00	0,00		
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.561.300				3.561.300							100,00		3.542.300	3.542.300	99,47	100,00	0,00		
	107	Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (15.00)	816.300				816.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		816.300	100,00		806.300	806.300	98,78	100,00	0,00		
	108	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (30.00)	2.385.000				2.385.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		2.385.000	100,00		2.376.000	2.376.000	99,62	100,00	0,00		
	109	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (5.00)	360.000				360.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		360.000	100,00		360.000	360.000	100,00	100,00	0,00		
4	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.061.250				181.061.250							100,00	25.247.700	144.260.650	169.508.350	93,62	100,00	0,00		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.340.100				7.340.100							100,00		5.658.385	5.658.385	76,98	100,00	0,00		
	1	Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	SwaKelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0	0,00	100,00	0,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %			
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
	112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (95.00)	7.340.100				7.340.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		7.340.100	100,00		5.650.385	5.650.385	76,98	100,00	0,00		
	<b>1.05.01.2.06.0002</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>11.329.200</b>				<b>11.329.200</b>						<b>100,00</b>			<b>7.431.200</b>	<b>7.431.200</b>	<b>65,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
	113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (95.00)	11.329.200				11.329.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		11.329.200	100,00		7.431.200	7.431.200	65,99	100,00	0,00		
	<b>1.05.01.2.06.0003</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>8.313.300</b>				<b>8.313.300</b>						<b>100,00</b>			<b>7.148.410</b>	<b>7.148.410</b>	<b>85,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
	114	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (95.00)	8.313.300				8.313.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		8.313.300	100,00		7.148.410	7.148.410	85,99	100,00	0,00		
	<b>1.05.01.2.06.0004</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>107.170.950</b>				<b>107.170.950</b>						<b>100,00</b>			<b>103.635.000</b>	<b>103.635.000</b>	<b>96,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.375.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %	Deviasi Fisik (%)	
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	115	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor (95.00)	107.170.990				107.170.990	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		107.170.990	100,00		103.635.000	103.635.000	96,70	100,00	0,00	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.575.200				8.575.200							100,00		8.575.200	8.575.200	100	100,00	0,00	
	1	Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
	116	Penyelesaian Barang Cetak dan Penggandaan (95.00)	8.575.200				8.575.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		8.575.200	100,00		8.575.200	8.575.200	94,02	100,00	0,00	
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.363.500				7.363.500							100,00		7.361.215	7.361.215	99,97	100,00	0,00	
	1	Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
	117	Penyelesaian Bahan/Material (95.00)	7.363.500				7.363.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		7.363.500	100,00		7.361.215	7.361.215	99,97	100,00	0,00	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.226.000				2.226.000							100,00		1.250.000	1.250.000	56,15	100,00	0,00	
	118	Fasilitas Kunjungan Tamu (100.00)	2.226.000				2.226.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		2.226.000	100,00		1.250.000	1.250.000	56,15	100,00	0,00	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.373.400				25.373.400							100,00	25.247.700		25.247.700	99,50	100,00	0,00	
	1	Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
	119	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (95.00)	25.373.400				25.373.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		25.373.400	100,00	25.247.700		25.247.700	99,50	100,00	0,00	
	<b>1.05.01.2.06.0010</b>	<b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>3.369.600</b>				<b>3.369.600</b>							<b>100,00</b>		<b>3.209.240</b>	<b>3.209.240</b>	<b>86,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	120	Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (15.00)	2.109.600				2.109.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		2.109.600	100,00		1.949.240	1.949.240	92,40	100,00	0,00	
	121	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (80.00)	1.060.000				1.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.060.000	100,00		760.000	760.000	71,70	100,00	0,00	
	122	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (5.00)	200.000				200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		200.000	100,00		200.000	200.000	100,00	100,00	0,00	
5	<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85.808.550</b>				<b>85.808.550</b>							<b>100,00</b>	<b>14.053.110</b>	<b>56.328.672</b>	<b>70.381.782</b>	<b>82,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.05.01.2.08.0002</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>68.681.550</b>				<b>68.681.550</b>							<b>100,00</b>		<b>56.328.672</b>	<b>56.328.672</b>	<b>82,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
	123	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (95.00)	68.681.550				68.681.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		68.681.550	100,00		56.328.672	56.328.672	82,01	100,00	0,00	
	<b>1.05.01.2.08.0004</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>17.127.000</b>				<b>17.127.000</b>							<b>100,00</b>	<b>14.053.110</b>		<b>14.053.110</b>	<b>82,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Alokasi Umum													
	124	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor (95.00)	17.127.000				17.127.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siskelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		17.127.000	100,00	14.053.110		14.053.110	82,05	100,00	0,00	
6	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.839.000				285.839.000							100,00		274.349.170	274.349.170	95,98	100,00	0,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000				38.220.000							100,00		38.058.649	38.058.649	99,58	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siskelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
	125	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (98.00)	38.220.000				38.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		38.220.000	100,00		38.058.649	38.058.649	99,58	100,00	0,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertalim Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.260.000				181.260.000							100,00		172.521.721	172.521.721	95,18	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertalim Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siskelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
	127	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertalim Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (98.00)	181.260.000				181.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		181.260.000	100,00		172.521.721	172.521.721	95,18	100,00	0,00	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.400.000				17.400.000							100,00		17.217.000	17.217.000	98,95	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siskelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
	2	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siskelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
	129	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (95.00)	17.400.000				17.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		17.400.000	100,00		17.217.000	17.217.000	98,95	100,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %			
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.959.000				48.959.000							100,00		46.551.800	46.551.800	95,08	100,00	0,00		
1		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Siwkelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
2		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Siwkelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
130		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (95.00)	48.959.000				48.959.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		48.959.000	100,00		46.551.800	46.551.800	95,08	100,00	0,00		
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.782.565.597	1.040.082.000			2.822.647.597							100,00	1.299.520.630	1.384.822.644	2.684.343.274	95,10	100,00	0,00		
7	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	761.153.800				761.153.800							100,00	675.419.146	31.846.390	710.224.520	93,31	100,00	0,00		
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	474.120.400				474.120.400							100,00	436.198.373	1.803.400	438.001.773	92,38	100,00	0,00		
1		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (10.00)	1.170.100				1.170.100	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.170.100	100,00		1.161.000	1.161.000	99,21	100,00	0,00		
2		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (85.00)	472.307.900				472.307.900	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Siwkelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		472.307.900	100,00	435.842.263		435.842.263	92,28	100,00	0,00		
3		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (5.00)	642.400				642.400	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		642.400	100,00		642.400	642.400	100,00	100,00	0,00		
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	27.402.000				27.402.000							100,00	2.740.000	24.662.000	27.402.000	100,00	100,00	0,00		
1		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan	0				0	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Siwkelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %	Deviasi Fisik (%)	
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia (5.00)																			
8		HUT Satpol Damkar Unmas Tk Kabupaten (25.00)	14.265.000				14.265.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		14.265.000	100,00		13.320.000	13.320.000	93,36	100,00	0,00	
11		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongprahe dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia (10.00)	114.000				114.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		114.000	100,00		114.000	114.000	100,00	100,00	0,00	
12		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongprahe dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia (30.00)	10.280.000				10.280.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		10.280.000	100,00		11.228.000	11.228.000	109,21	100,00	0,00	
13		Pengiriman Personil pada HUT Satpol Tk. Provinsi (30.00)	2.740.000				2.740.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		2.740.000	100,00	2.740.000		2.740.000	100,00	100,00	0,00	
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	6.600.700				6.600.700						100,00	5.260.000	1.098.000	6.358.000	96,32	100,00	0,00		
12		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (15.00)	798.100				798.100	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		798.100	100,00		792.400	792.400	99,29	100,00	0,00	
13		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (20.00)	5.497.000				5.497.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		5.497.000	100,00	5.260.000		5.260.000	95,69	100,00	0,00	
14		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (5.00)	305.600				305.600	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		305.600	100,00		305.600	305.600	100,00	100,00	0,00	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	250.723.700				250.723.700						100,00	234.179.757	4.282.990	238.462.747	95,11	100,00	0,00		
15		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (4.00)	1.700.500				1.700.500	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.700.500	100,00		1.692.990	1.692.990	99,53	100,00	0,00	
16		Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	246.432.800				246.432.800	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok -	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		246.432.800	100,00	231.576.883		231.576.883	93,97	100,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %	Deviasi Fisik (%)	
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (95.00)						Pencapaian Disiplin													
17		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (1.00)	2.990.400				2.990.400	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		2.990.400	100,00		2.990.400	2.990.400	100,00	100,00	0,00	
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	2.307.000				2.307.000							100,00			0	0,00	100,00	0,00	
1		Penyediaan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah (5.00)	0				0	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
18		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah (95.00)	2.307.000				2.307.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		2.307.000	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
8	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	978.378.797	1.040.082.000			2.018.460.797							100,00	607.032.500	1.325.251.654	1.932.284.154	95,75	100,00	0,00	
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23.160.400				23.160.400							100,00		22.643.600	22.643.600	95,83	100,00	0,00	
20		Penyediaan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (5.00)	1.194.400				1.194.400	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.194.400	100,00		1.108.600	1.108.600	96,03	100,00	0,00	
21		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (92.00)	21.206.000				21.206.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		21.206.000	100,00		20.735.000	20.735.000	95,66	100,00	0,00	
22		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (3.00)	800.000				800.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		800.000	100,00		800.000	800.000	100,00	100,00	0,00	
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		525.000.000			525.000.000							100,00		511.670.963	511.670.963	97,46	100,00	0,00	
23		Penyediaan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang		536.000			536.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		536.000	100,00		536.000	536.000	100,00	100,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>						<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %			
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Penyimpanan Barang Bukti (3.00)																				
24		Rengas dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Geler Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) (35.00)		523.856.000			523.856.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Tender		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		523.856.000	100,00		510.526.963	510.526.963	97,46	100,00	0,00		
25		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Geler Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) (2.00)		388.000			388.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		388.000	100,00		388.000	388.000	100,00	100,00	0,00		
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	11.863.000				11.863.000							100,00	3.325.000	731.800	4.056.800	34,20	100,00	0,00		
26		Periapan Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah (10.00)	463.500				463.500	Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		463.500	100,00		457.000	457.000	98,60	100,00	0,00		
27		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah (85.00)	11.075.000				11.075.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		11.075.000	100,00	3.325.000		3.325.000	30,02	100,00	0,00		
28		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah (5.00)	324.500				324.500	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		324.500	100,00		274.800	274.800	84,68	100,00	0,00		
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	111.447.300				111.447.300							100,00		91.022.300	91.022.300	81,67	100,00	0,00		
29		Periapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (5.00)	1.630.000				1.630.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.630.000	100,00		1.630.000	1.630.000	100,00	100,00	0,00		
30		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (93.00)	109.417.300				109.417.300	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		109.417.300	100,00		88.992.300	88.992.300	81,33	100,00	0,00		
31		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (2.00)	400.000				400.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		400.000	100,00		400.000	400.000	100,00	100,00	0,00		
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	548.050.397	515.082.000			1.063.132.397							100,00	381.737.100	646.261.491	1.027.998.591	96,70	100,00	0,00		
32		Periapan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah (2.00)	6.534.900				6.534.900	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		6.534.900	100,00		6.234.900	6.234.900	95,41	100,00	0,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>						<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
33		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (16.00)	74.836.600				74.836.600	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Siskelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		74.836.600	100,00	66.532.000		66.532.000	88,90	100,00	0,00	
34		Pembongkaran Pelanggaran Perca Perca (13.00)	146.297.400				146.297.400	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		146.297.400	100,00		127.033.300	127.033.300	86,83	100,00	0,00	
35		Femberantasan BKC Jegal (28.00)	315.811.097				315.811.097	DBH Cukai Hasil Tembakau (DHT)	Siskelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		315.811.097	100,00	315.205.100		315.205.100	99,81	100,00	0,00	
36		Penyediaan Sarana Pendukung BKC Jegal (40.00)		515.082.000			515.082.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (DHT)	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		515.082.000	100,00		495.462.891	495.462.891	96,19	100,00	0,00	
37		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah (1.00)	4.570.400				4.570.400	DBH Cukai Hasil Tembakau (DHT)	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		4.570.400	100,00		4.570.400	4.570.400	100,00	100,00	0,00	
1.05.02.2.02.0012		<b>Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>283.857.700</b>				<b>283.857.700</b>							<b>100,00</b>	<b>222.670.400</b>	<b>52.221.500</b>	<b>274.891.900</b>	<b>96,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
38		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (3.00)	4.610.300				4.610.300	DBH Cukai Hasil Tembakau (DHT)	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		4.610.300	100,00		4.610.300	4.610.300	100,00	100,00	0,00	
39		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (20.00)	38.839.000				38.839.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Siskelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		38.839.000	100,00	37.435.000		37.435.000	96,39	100,00	0,00	
40		Pengumpulan Informasi BKC Jegal (80.00)	187.231.400				187.231.400	DBH Cukai Hasil Tembakau (DHT)	Siskelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		187.231.400	100,00	185.335.400		184.335.400	98,96	100,00	0,00	
41		Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan Femberantasan BKC Jegal (16.00)	52.697.000				52.697.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (DHT)	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		52.697.000	100,00		47.131.200	47.131.200	89,44	100,00	0,00	
42		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (1.00)	480.000				480.000	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		480.000	100,00		480.000	480.000	100,00	100,00	0,00	
9	1.05.02.2.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>43.033.000</b>				<b>43.033.000</b>							<b>100,00</b>		<b>41.834.600</b>	<b>41.834.600</b>	<b>97,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.05.02.2.03.0005	<b>Dukungan Operasional Sekretariat PPNS</b>	<b>36.693.300</b>				<b>36.693.300</b>							<b>100,00</b>		<b>35.544.600</b>	<b>35.544.600</b>	<b>96,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
46		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS (10.00)	0				0	Pencapaian Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Siskelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0	0,00	100,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %	Deviasi Fisik (%)	
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
47		Dukungan Operasional Sekretariat PPKS (83.00)	36.174.000				36.174.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		36.174.000	100,00		35.075.000	35.075.000	96,96	100,00	0,00	
48		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPKS (3.00)	519.300				519.300	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		519.300	100,00		469.600	469.600	90,43	100,00	0,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPKS	6.339.700				6.339.700							100,00		6.290.000	6.290.000	99,22	100,00	0,00	
1		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPKS (3.00)	0				0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Siskelote Tipe I		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00		
49		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPKS (90.00)	5.690.000				5.690.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		5.690.000	100,00		5.690.000	5.690.000	100,00	100,00	0,00	
50		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPKS (3.00)	689.700				689.700	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		689.700	100,00		640.000	640.000	92,79	100,00	0,00	
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.002.276.960				1.002.276.960							100,00	374.833.275	513.445.611	888.278.886	88,63	100,00	0,00	
10	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	902.994.360				902.994.360							100,00	374.458.275	356.277.217	821.700.490	91	100,00	0,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	336.651.800				336.651.800							100,00	304.484.273	1.573.300	306.057.573	90,91	100,00	0,00	
51		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (3.00)	980.800				980.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		980.800	100,00		973.300	973.300	99,24	100,00	0,00	
52		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (95.00)	335.071.000				335.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siskelote Tipe I		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		335.071.000	100,00	304.484.273		289.830.620	86,50	100,00	0,00	
53		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (2.00)	600.000				600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		600.000	100,00		600.000	600.000	100,00	100,00	0,00	
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban	77.438.600				77.438.600							100,00	63.870.000	435.790	64.305.790	83,04	100,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %	Deviasi Fisik (%)	
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>Kebakaran dan Non Kebakaran</b>																			
54		Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (3.00)	298.600				298.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		298.600	100,00		298.790	298.790	99,06	100,00	0,00	
55		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (95.00)	77.000.000				77.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siwakelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		77.000.000	100,00	63.870.000		63.870.000	82,95	100,00	0,00	
56		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (2.00)	140.000				140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		140.000	100,00		140.000	140.000	100,00	100,00	0,00	
	<b>1.05.04.2.01.0005</b>	<b>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</b>	<b>242.950.000</b>				<b>242.950.000</b>							<b>100,00</b>		<b>231.616.700</b>	<b>231.616.700</b>	<b>95,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siwakelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
2		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siwakelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
57		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (90.00)	242.950.000				242.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		242.950.000	100,00		160.131.700	160.131.700	65,91	100,00	0,00	
	<b>1.05.04.2.01.0007</b>	<b>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</b>	<b>27.735.000</b>				<b>27.735.000</b>							<b>100,00</b>		<b>18.632.000</b>	<b>18.632.000</b>	<b>67,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siwakelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
58		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (90.00)	27.735.000				27.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		27.735.000	100,00		18.632.000	18.632.000	67,18	100,00	0,00	
59		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siwakelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
	<b>1.05.04.2.01.0011</b>	<b>Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)</b>	<b>113.964.300</b>				<b>113.964.300</b>							<b>100,00</b>		<b>108.281.436</b>	<b>108.281.436</b>	<b>95,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi						KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %	Deviasi Fisik (%)	
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
60		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (5.00)	779.300				779.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		779.300	100,00		768.500	768.500	99,12	100,00	0,00	
61		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (30.00)	112.789.000				112.789.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		112.789.000	100,00		107.112.936	107.112.936	94,97	100,00	0,00	
62		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (5.00)	400.000				400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		400.000	100,00		400.000	400.000	100,00	100,00	0,00	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	97.630.660				97.630.660							100,00		86.302.991	86.302.991	88,40	100,00	0,00	
1		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri ( )					0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Svikelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		0	0,00		0	0,00	100,00	100,00		
63		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (100.00)	97.630.660				97.630.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		97.630.660	100,00		66.822.991	66.822.991	68,44	100,00	0,00	
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.624.000				6.624.000							100,00	6.104.000	400.000	6.504.000	98,19	100,00	0,00	
65		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (10.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Svikelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	100,00	0,00	
66		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (35.00)	6.224.000				6.224.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Svikelote Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		6.224.000	100,00	6.104.000		6.104.000	98,07	100,00	0,00	
67		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (5.00)	400.000				400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		400.000	100,00		400.000	400.000	100,00	100,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	3.962.800				3.962.800							100,00		212.800	212.800	5,37	100,00	0,00	
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.962.800				3.962.800							100,00		212.800	212.800	5,37	100,00	0,00	
68		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
69		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (95.00)	3.750.000				3.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		3.750.000	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
70		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (2.00)	212.800				212.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		212.800	100,00		212.800	212.800	100,00	100,00	0,00	
12	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	5.429.800				5.429.800							100,00	375.000	1.116.596	1.491.596	27,47	100,00	0,00	
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	5.429.800				5.429.800							100,00	375.000	1.116.596	1.491.596	27,47	100,00	0,00	
71		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (3.00)	915.000				915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		915.000	100,00		851.796	851.796	93,09	100,00	0,00	
72		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (95.00)	4.250.000				4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		4.250.000	100,00	375.000		375.000	8,82	100,00	0,00	
73		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (2.00)	264.800				264.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		264.800	100,00		264.800	264.800	100,00	100,00	0,00	
13	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	89.890.000				89.890.000							100,00		64.874.000	64.874.000	72,17	100,00	0,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	78.170.000				78.170.000							100,00		54.132.000	54.132.000	69,25	100,00	0,00	
74		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (3.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
75		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	77.770.000				77.770.000	Dana Transfer Umum-Dana	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		77.770.000	100,00		53.732.000	53.732.000	69,09	100,00	0,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>11.349.095.238</b>	<b>1.040.082.000</b>			<b>12.389.177.238</b>					<b>13.355.000</b>	<b>8.550.897.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.422.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.829.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KBT	
			Operasi	Modal	Tidak Tertugas	Transfer	Jumlah								Keuangan				Raih %			
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				Raih %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Melaku Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (95.00)						Akasi Umum														
76		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pembentukan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (2.00)	400.000				400.000	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Oct-2025		400.000	100,00		400.000	400.000	100,00	100,00	0,00		
<b>1.05.04.1.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran</b>			<b>11.720.000</b>				<b>11.720.000</b>						<b>100,00</b>		<b>10.742.000</b>	<b>10.742.000</b>	<b>91,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
77		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Sekeloa Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Oct-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00			
78		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (90.00)	11.320.000				11.320.000	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Oct-2025		11.320.000	100,00		10.342.000	10.342.000	91,36	100,00	0,00		
79		Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (5.00)	400.000				400.000	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Oct-2025		400.000	100,00		400.000	400.000	100,00	100,00	0,00		
<b>Jumlah</b>			<b>11.948.000.238</b>	<b>1.048.081.000</b>			<b>12.386.177.238</b>					<b>12.386.000</b>	<b>8.890.897.881</b>	<b>100,00</b>	<b>8.423.379.871</b>	<b>2.406.896.797</b>	<b>11.826.276.668</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		



**PENGHARGAAN DAN DOKUMENTASI PENGHARGAAN YANG DITERIMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARANKABUAPTEN PURWOREJO TAHUN 2025**

No.	Nama Piagam/ Penghargaan	Pemberi Piagam/ Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
1	2	3	4	5
1.	Juara I Perangkat Daerah dengan Evaluasi Kinerja Terbaik Tahun 2025 Kategori Sekretariat/ Badan/ Dinas.	Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo	Evaluasi Kinerja Terbaik Tahun 2025 Kategori Sekretariat/ Badan/ Dinas	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO



SISWANTORO DWI NUGROHO, S.STP.,M.M.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 198205162001121003